

KURIKULUM OBE PROGRAM STUDI (S1) SARJANA ILMU PEMERINTAHAN TAHUN 2023 (REVISI 2024)



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

#### **UNIVERSITAS TADULAKO**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119 Surel: <u>untad@untad.ac.id</u> Laman: <u>https://untad.ac.id</u>

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO NOMOR 6443/UN28/HK.03/2024

#### TENTANG

PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME – BASED EDUCATION (OBE)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO

#### REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Menimbang: a.

- a. bahwa Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako melalui surat nomor 2618/UN28.3/DT.00.00/2024 tanggal 21 Agustus 2024 mengusulkan penetapan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;
- b. bahwa Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) berfokus pada capaian pembelajaran (learning outcomes) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berorientasi pada masa depan. Nilai utama dalam kurikulum ini berdasarkan pada konsep pembelajaran mandiri, kreatif, fleksibel, dan inovatif bagi mahasiswa, diharapkan dapat mewujudkan visi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka perlu menerapkan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Sarjana (S1) tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako;

· Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako:
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Tahun 2013 Nomor 831);

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian HasilBelajar Mahasiswa;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14377/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode Tahun 2023-2027;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS OUTCOME-BASED **EDUCATION** (OBE) PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA (S1) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TADULAKO.

KESATU

: Kurikulum Berbasis Outcome-Based Education (OBE) Program Studi Ilmu Pemerintahan Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako ditetapkan dalam bentuk Buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

**KEDUA** 

Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Palu tanggal 26 Agustus 2024 KUNIVERSITAS TADULAKO, . AMAR, S.T., M.T. NIP. 19680714199403100d

#### Tembusan:

- 1. Ketua Senat UNTAD.
- 2. Ketua SPI UNTAD.
- 3. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
- 4. Wakil Rektor dalam lingkungan UNTAD.
- 5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UNTAD.
- Direktur Pascasarjana UNTAD.
- 7. Ketua Lembaga dalam Lingkungan UNTAD.
- 8. Kepala Biro dalam lingkungan UNTAD.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 6443/UN28/HK.03/2024
TANGGAL 26 AGUSTUS 2024
TENTANG PENETAPAN KURIKULUM BERBASIS
OUTCOME-BASED EDUCATION (OBE) PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO

#### DAFTAR MATA KULIAH Ps (S1) ILMU PEMERINTAHAN

No.	We do Barry W. 1. 1.	SEMESTER I						
to a distribution	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS					
1	U00131002	Pendidikan Pancasila	2					
2	B04231001	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	3					
3	B0415102	Pengantar Ilmu Politik	3					
4	B04231002	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	3					
5	U00131009	Bahasa Inggris	2 2					
6	U00131003 Bahasa Indonesia							
7	U00131001	Pendidikan Agama	2					
8	U00131005	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi	2					
9	B0415101	Ko-Kurikulum I (Beladiri Karate) Praktikum	1					
		Jumlah	20					
	The Control of the Co	SEMESTER II						
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS					
1	B0415103	Sistem Politik Indonesia	3					
2	U00131004	Pendidikan Kewarganegaraan	2					
3	U00131007	Kewirausahaan (Praktikum)	2					
4	B04231003	Pemerintahan Nasional	3					
5	B04231004	Sosiologi Pemerintahan	3					
6	B0415134	Filsafat Ilmu	3					
7	B0415102	Kokurikuler II (Praktikum)	1					
8	B04241001	Politik Lingkungan (PPL)	3					
		Jumlah	20					
		SEMESTER III						
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS					
No. 1	Kode Mata Kuliah U00131008		Jumlah SKS					
-		Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum)	2					
1	U00131008		2 3					
1 2	U00131008 B04231005	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL)	2 3 3					
1 2 3	U00131008 B04231005 B04231006	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah	2 3 3 3					
1 2 3 4	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL)	2 3 3 3 3					
1 2 3 4 5	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan	2 3 3 3 3 3					
1 2 3 4 5 6	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan	2 3 3 3 3 3 3					
1 2 3 4 5 6 7	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)	2 3 3 3 3 3 3 3					
1 2 3 4 5 6 7	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan	2 3 3 3 3 3 3					
1 2 3 4 5 6 7	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)	2 3 3 3 3 3 3 3 23					
1 2 3 4 5 6 7 8	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132 B0415130	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Hmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)  SEMESTER IV Nama Mata Kuliah	2 3 3 3 3 3 3 3 23					
1 2 3 4 5 6 7 8	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132 B0415130  Kode Mata Kuliah	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)  ' Jumlah SEMESTER IV Nama Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	2 3 3 3 3 3 3 3 23 Jumlah SKS					
1 2 3 4 5 6 7 8	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132 B0415130  Kode Mata Kuliah B04231008	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)  SEMESTER IV Nama Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Global Governmence & Perbandingan Pemerintahan	2 3 3 3 3 3 3 3 23 Jumlah SKS					
1 2 3 4 5 6 7 8	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132 B0415130  Kode Mata Kuliah B04231008 B04231009	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)  SEMESTER IV Nama Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Global Governmence & Perbandingan Pemerintahan Digital Government (PPL)	2 3 3 3 3 3 3 3 23 Jumlah SKS 3 3					
1 2 3 4 5 6 7 8	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132 B0415130  Kode Mata Kuliah B04231008 B04231009 B04231010 B0415115	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)  ' Jumlah SEMESTER IV Nama Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Global Governmence & Perbandingan Pemerintahan Digital Government (PPL) Tata Kelola SDM Pemerintahan	2 3 3 3 3 3 3 3 23 Jumlah SKS 3 3 3					
1 2 3 4 5 6 7 8	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132 B0415130  Kode Mata Kuliah B04231008 B04231009 B04231010 B0415115 B04231011	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)  SEMESTER IV  Nama Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Global Governmence & Perbandingan Pemerintahan Digital Government (PPL) Tata Kelola SDM Pemerintahan Pelayanan Sektor Publik	2 3 3 3 3 3 3 3 23 Jumlah SKS 3 3 3 3					
1 2 3 4 5 6 7 8	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132 B0415130  Kode Mata Kuliah B04231008 B04231009 B04231010 B0415115 B04231011 B04231012	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)  SEMESTER IV  Nama Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Global Governmence & Perbandingan Pemerintahan Digital Government (PPL) Tata Kelola SDM Pemerintahan Pelayanan Sektor Publik Perencanaan Pembangunan (PPL)	2 3 3 3 3 3 3 3 23 Jumlah SKS 3 3 3 3 3 3					
1 2 3 4 5 6 7 8	U00131008 B04231005 B04231006 B0415117 B0415123 B04231007 B0415132 B0415130  Kode Mata Kuliah B04231008 B04231009 B04231010 B0415115 B04231011	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum) Hukum Pemerintahan (PPL) Pemerintahan Daerah Pemerintahan Desa (PPL) Etika Pemerintahan Birokrasi Pemerintahan Metode Ilmiah Pemerintahan Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)  SEMESTER IV  Nama Mata Kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan Global Governmence & Perbandingan Pemerintahan Digital Government (PPL) Tata Kelola SDM Pemerintahan Pelayanan Sektor Publik	2 3 3 3 3 3 3 3 23 Jumlah SKS 3 3 3 3					

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B04231014	Tata Kelola Penanggulangan Bencana (PPL)	3
2	B0415133	Ekologi Pemerintahan	3
3	B04231016	Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Praktikum)	3
4	B0415108	Sistem Kepartaian dan Pemilu Indonesia	3
5	B04231016	lo T Big Data (Pratikum)	3
6	B0415106	Kajian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPL)	3
7	B04241002	Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan	3
8		Pilihan	3
		Jumlah	24
		SEMESTER VI	
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0415118	Pengambilan Keputusan Stratejik	3
2	B0415125	Pemerintahan dan Politik Lokal	3
3	B0415114	Manajemen Politik	3
4	B0415113	Kajian Good Governmance	3
5	B04231017	Civil Soceity & Demokrasi (PPL)	3
6	B04231018	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan (PPL)	3
7	E3.8	Pilihan	3
		Jumlah	21
A PATEN		SEMESTER VII	
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0015103	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4
2	B04231019	Penelitian Mandiri & Proposal Karya Ilmia	2
3		Pilihan	3
WW. 100 STATE OF THE STATE OF T		Jumlah	9
		SEMESTER VIII	
No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0015104	Skripsi	4
		Jumlah	4
		TOTAL SKS	145

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0415112	Kajian Organisasi Sosial Politik Indonesia	3
2	B04231020	Kajian Kelembagaan Masyarakat Lokal	3
•3	B04231021	Statistik dan Data Science	3
4	B0415135	Psikologi Pemerintahan	3
5	B04241003	Resolusi Konflik	3
6	B04231022	Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang dan Jasa	3
7	B04231023	Studi Gender	3
8	B04231024	Kajian Kedaruratan Bencana	3
9	B0415129	Seminar Masalah Pemerintahan	3
		Jumlah	27

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. AMAR, S.T., M.T. NIP. 196807141994031006



## **DOKUMEN**

## Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



UNIVERSITAS TADULAKO Tahun 2024

## **DOKUMEN**

## Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

## **Program Studi Ilmu Pemerintahan**

## Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Nama Ketua Tim: Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si

NIDN : 0020037504

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Tadulako

UNIVERSITAS TADULAKO TAHUN 2024

#### TIM PENYUSUN KURIKULUM

Ketua Tim Penyusun : Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si

Sekretaris : Sisrilnardi, S.IP, M.Si

Anggota : 1. Dr. Muh. Nawawi, M.Si

2. Dr. Muhammad Arief, S.IP, M.Si

Dr. Mahfuzat, S.IP, M.Si
 Dr. Nurhannis, M.Si
 Dr. Yunus, S.Sos, M.Si

6. Rusmawaty Bte. Rusdin, S.Sos, MA

#### KATA PENGANTAR

Ucapan rasa syukur pada pemilik semeseta, Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada tim penyusun kurikulum, sehingga Dokumen Kurikulum Outcome Base Education Kampus Merdeka, Merdeka Belajar Program Studi (S1) Ilmu Pemerintahan Tahun 2023 Fisip - Universitas Tadulako (Revisi Tahun 2024).

Penyusunan kurikulum ini menjadi kewajiban yang diinstruksikan Rektor Universitas Tadulako tentang perlunya pembaharuan kurikulum program studi di lingkup Universitas Tadulako setiap empat tahun sekali, juga merespon perubahan kurikulum di perguruan tinggi yang juga mengalami pembaharuan menyesuaikan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*).

Kurikulum periode 2024-2027 merupakan rekonstruksi terhadap kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad sebelumnya yang disusun pada tahun 2023. Pembaharuan kurikulum ini ditujukan agar terjadi sinkronisasi antara program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar (MBKM) yang ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Visi dan Misi Universitas Tadulako Tahun 2020-2045, Visi dan Misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pengelolaan pengajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako dan Kurikulum KAPSIPI berbasi *Outcome Based Education* (OBE).

Dokumen Kurikulum S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad ini menjadi acuan dalam kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan akademik selama empat tahun kedepan, dan tentu kurikulum ini dapat diubah untuk dilakukan penyesuaian kembali jika dianggap perlu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada pihak pimpinan universitas, pimpinan fakultas, rekan - rekan dosen serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Palu. Juli 2024

Ketua Tim

#### **IDENTITAS PROGRAM STUDI**

1	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Tadulako
	(PT)	√ PTN □ PTS
2	Fakultas	Ilmu Soial dan Ilmu Politik
3	Jurusan/Departemen	Ilmu Administarasi
4	Program Studi	Ilmu Pemerintahan
	Status Akreditasi	Baik Sekali (3694/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024)
6	Jumlah Mahasiswa	1.050
7	Jumlah Dosen	22
8	Alamat Prodi	Jl. Soekarno Hatta, Km. 9, Palu.
9	Telpn	(0451) 429378
10	Web PRODI/PT	https://pemerintahan.fisip.untad.ac.id/

# KURIKULUM OUTCOME BASE EDUCATION KAMPUS MERDEKA, MERDEKA BELAJAR PROGRAM STUDI (S1) ILMU PEMERINTAHAN TAHUN 2023 FISIP-UNIVERSITAS TADULAKO (REVISI TAHUN 2024)

#### 1. LANDASAN

#### 1.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu me ningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976) Landasan filosofi pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan FISIP Universitas Tadulako mengacu pada tiga nilai filosofi, yaitu pancasila, kearifan lokal dan nilai yang terkandung dalam filsafat ilmu pemerintahan.

Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara membawah nilai-niai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan nasional, kebijaksanaan dan keadilan. Artinya, kurikulum pendikan tinggi yang dibuat harus membawa peserta didik agar memiliki sikap ketaatan kepada Tuhan-NYA, sikap humanisme dan menghormati hak asasi, memelihara keutuhan nasional, memiliki kebijaksanaan dan bersikap adil. Nilai-nilai pancasila tersebut dijewantahkan kembali dalam sistem hukum nasional mulai dari UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2012, serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta ketentuan lain yang berlaku. Sistem hukum nasional inilah yang menjadi landasan dalam penyusunan kurikulum.

Kedua, nilai kearifan lokal yang melandasi dalam penyusunan kurikulum prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad adalah nilai-nilai ke-Tadulako-an. Tadulako dalam konsep dan persepsi komunitas orang Kaili adalah "julukan atau personifikasi" bagi siapa saja yang berhasil pulang membawa kemenangan dalam perang. Tadulako juga, memiliki makna bagi mereka yang berhasil dalam tugas membela dan mempertahankan "kedaulatan" Kerajaan, dari serangan atau ancaman dari luar. Tadulako secara kongkrit berarti pemimpin memiliki sifat-sifat keutamaan (adil, bijaksana, jujur, cerdas, berani, bersemangat, pengayom, pembela kebenaran). Mengacu pada nilai ke-Tadulako-an itu, maka peserta didik pada program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan sarjana yang menjujung tinggi nilai keadilan, kebijaksanaan, kejujuran, kecerdasan, keberanian, semangat, mengayomi dan membela kebenaran.

Ketiga, filsafat ilmu pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu pemerintahan memiliki aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi adalah menyangkut pengkajian suatu ilmu pengetahuan dengan pembatasan lingkup penelaahannya. Epistemologi meliputi persoalan-persoalan bagaimana proses yang memunginkan diperolehnya pengetahuan? bagaimana prosedurnya?

Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya? Cara/teknik/sarana apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? Sedangkan aksiologi menyangkut tujuan dan nilai penggunaan ilmu, dimana pada dasarnya ilmu harus digunakan dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia (Suriasumantri, 2007).

Secara ontologi, ilmu pemerintahan mempelajari tentang negara, namun secara forma (kekhususan) mengkaji tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah, *governance* (tata kelola), hubungan antar lembaga-lembaga negara, fungsi pemerintah, aktivitas pemerintah dan gejala-gejala pemerintahan. Selanjutnya, epistemologi ilmu pemerintahan dipelajari melalui pendekatan ilmiah kualitatif dan kuantitif atau mengabungkan keduanya. Dalam aspek kemanfataan (ontologi), kehadiran ilmu pemerintahan diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, serta menemukan dan mengembangkan teori-teori pemerintahan untuk memperkaya khasanah keilmuan.

Disamping nilai-nilai di atas, landasan penyusunan kurikulum ilmu pemerintahan juga mengacu pada beberapa filosofi, yakni filosofi perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Filosofi perenialisme, didasarkan pada aspek realisme, memiliki tujuan untuk mendidik mahasiswa agar menjadi pribadi yang rasional. Dalam aspek perenialisme, fokus kurikulumnya adalah penekanan pada matakuliah klasik dan analisis berbagai referensi atau literatur. Filosofi esensialisme, yang didasarkan pada aspek realisme dan idealisme, bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual mahasiswa dan mendidik mahasiswa agar menjadi orang yang kompeten. Filosofi esensialisme menekankan pada keterampilan pokok reading, writing, dan aritmatika, serta matakuliah esensial. Filosofi progresivisme yang didasarkan pada aspek pragmatisme, bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sosial demokratis yang memfokuskan kurikulum berdasarkan minat dan bakat mahasiswa. pengembangan kemampuan individu agar mampu melakukan pemecahan masalah. Filosofi rekonstruksionisme yang juga didasarkan pada aspek pragmatisme. memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan keterampilan sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Fokus dari filosofi ini adalah penekanan pada penguasaan ilmu-ilmu sosial dan metode riset.

#### 1.2. Landasan Sosiologis

Program pendidikan disusun dan dipengaruhi oleh nilai, masalah, kebutuhan, dan tantangan dalam masyarakat. Karena itu kehidupan masyarakat dan budaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan. Pengembangan kurikulum sebaiknya mengacu kepada aspek sosiologis dikarenakan peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan dalam lingkungan masyarakat, dan diarahkan agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Clyde Kluckhohn, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Masyarakat baik suatu

sistem maupun subsistem berikutnya dapat memengaruhi proses pendidikan, oleh karena itu, dalam penyusunan kurikulum harus mempertimbangkan keberadaan masyarakat (Hamalik, 2008).

Pengembangan kurikulum prodi ilmu pemerintahan FISIP Untad mengacu pada aspek sosiologis masyarakat Sulawesi Tengah yang multi etnik, multi agama, multi budaya, dan multi bencana. Dalam konteks masyarakat yang beragam itu, maka kurikulum prodi ilmu pemerintahan diarahkan untuk menghasilkan masyarakat yang mampu memelihara stabilitas sosial, mewujudkan perdamaian dan menumbuhkan sikap toleransi antar sesama. Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah rentan bencana, maka kurikulum ilmu pemerintahan diarahkan untuk berkontribusi pada kesiapsiagaan terhadap berbagai bentuk bencana (alam maupun non alam) dan tata Kelola kebencanaan (disaster governance). Disamping itu, kondisi sosiologis masyarakat Sulawesi Tengah juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan globalisasi terutama masuknya investasi asing di Sulawesi Tengah.

Pada kondisi itu, maka kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Ki Hadjar Dewantoro, menekan bahwa hakekat pendidikan, serta strategi mencapai hasil pendidikan yang sesuai dengan budaya Indonesia mengadung tiga prinsip yaitu Kontinyu, Konvergen, serta Konsentris bermakna bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang berkelanjutan sepanjang hayat, memadukan antara ilmu pengetahuan yang bersumber dari dalam dan luar negeri dengan kelembutan budi pekerti yang bersumber dari budaya nasional Indonesia.

Dalam pencapaian tujuan pendidikan terdapat tiga sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan, yaitu: logika, estetika, dan etika. Logika adalah aspek pengetahuan dan penalaran, estetika berkaitan dengan aspek emosi atau perasaan, dan etika berkaitan dengan aspek nilai. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan adalah nilai-nilai yang bersumber pada logika (pikiran). Sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada hakikatnya adalah hasil kebudayaan manusia, maka kehidupan manusia semakin luas, semakin meningkat sehingga tuntutan hidup pun semakin tinggi. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Dalam konteks inilah kurikulum program studi ilmu pemerintahan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat tersebut, tidak hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu program studi ilmu pemerintahan sebagai pembina dan pelaksana kurikulum melakukan evaluasi terhadap kurikulum guna mengantisipasi perkembangan masyarakat, agar apa yang diberikan kepada peserta didiknya relevan dan berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Penerapan teori, prinsip, hukum, dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua materi yang ada dalam kurikulum, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta pemangku kepentingan (stake holder) yang di singkronisasikan dalam berbagai mata kuliah yang ditempuh oleh

mahasiswa, sehingga hasil belajar yang dicapai dapat lebih bermakna dalam kehidupan. Pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat, yang diwujudkan dengan menetapkan profil lulusan dan capaian pembelajaran.

#### 1.3. Landasan Psikologis

Pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan terjadi interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan sosial. Melalui pendidikan diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia/peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan.

Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan/program pendidikan, sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan dilandasi oleh asumsi - asumsi yang berasal dari psikologi yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Pengembangan kurikulum ilmu pemerintahan harus menumbuhkan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik peserta didik.

Aspek kognitif adalah aspek yang mencakup kegiatan mental (otak). Aspek kognitif terkait dengan kemampuan intelektual atau kemampuan seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Hasil belajar dalam aspek kognitif erat kaitannya dengan bertambahnya wawasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang akan memiliki pemahaman yang lebih baik setelah menempuh program pelatihan. Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai (value). Istilah sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang situasi, namun aspek paling esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Pendidikan afektif sangat penting, untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu anak didik mampu dan mau mengamalkan pengetahuan yang diperoleh dari dunia pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek afektif terkait dengan kemauan seseorang dalam menerima dan mengamalkan nilai dan norma yang dipelajari.

Aspek, psikomotorik merupakan proses pengetahuan yang banyak didasarkan dari pengembangan proses mental melalui aspek-aspek otot dan membentuk keterampilan. Dalam pengembangannya, pendidikan psikomotorik disamping proses mnggerakkan otot, juga telah berkembang dengan pengetahuan yang berkaitan dengan keterampilan hidup. Aspek psikomotorik sebagai hasil belajar berhubungan dengan keterampilan fisik yang dimiliki oleh

seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Belajar akan membuat seseorang memiliki keterampilan dalam melakukan sesuatu tugas dan pekerjaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Aspek psikomotorik erat kaitannya dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik.

Kurikulum harus mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976); kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

#### 1.4. Landasan Historis

Pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk lebih mengenali sejarah masyarakat Sulawesi Tengah dari masa kerajaan, kolonialisme, kemerdekaan hingga era reformasi. Penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Prof. Sulaeman Mamar, guru besar FISIP Untad menyebutkan Propinsi Sulawesi Tengah dahulu merupakan wilayah pemerintahan raja-raja, dan seiring dengan perkembangan masyarakat melalui proses migrasi, Sulawesi Tengah telah dihuni oleh beraneka macam suku bangsa seperti: Suku Bugis, Makassar, Mandar, Banjar, Minang, Jawa, Minahasa, Arab, India, Cina dan suku bangsa penduduk. Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 10 macam suku terasing yang menempati daerah pegunungan dan 12 suku bangsa asli yang bermukim di daerah daratan dan lembah. Ke 12 suku bangsa asli tersebut ialah: Kaili, Kulawi, Pamona, Mori, Tomini, Bungku, Toli-Toli, Buol, Balantak, Lore dan Saluan. Di antara suku-suku bangsa asli tersebut, Kaili merupakan suku bangsa yang terbesar jumlahnya asli (Mamar dkk, 1984).

Menurut sejarawan Universitas Tadulako, Haliadi Sadi (2017) memasuki abad 20 perkembangan Sulawesi Tengah mengalami transformasi dan terbentuk masyarakat baru. Dikisahkannya bahwa meski masih ada masyarakat tradisional yang menghuni gunung-gunung dan lembah, namun jumlahnya semakin berkurang seiring dengan sentuhan pembangunan dan migrasi penduduk baik secara alamiah maupun melalui proses transmigrasi. Dengan adanya transmigrasi masyarakat kota menuju ke desa-desa yang tersebar di pedalaman Sulawesi Tengah menjadikan daerah pedalaman berubah sebagai rural-metropolitan yaitu desa yang menampakkan wajah kehidupan masyarakat perkotaan. Di abad 21 masyarakat Sulawesi Tengah perkembangan mulai dipengaruhi pertumbuhan kapitalisme. Dr. M. Nur Alamsyah, dosen FISIP Universitas Tadulako menggambarkan perubahan yang terjadi di Sulawesi Tengah. khususnya Kabupaten Morowali, pasca industrialisasi nikel. Digambarkannya bahwa penduduk desa di Morowali yang dahulunya bekerja sebagai petani dan

nelayan mulai beralih pada masyarakat industri yang bekerja sebagai buruh pabrik nikel yang digerakkan oleh investasi asing, khususnya Cina. Perubahan masyarakat ini menurut Nur Alamsyah (2021) tidak hanya mengubah wajah desa menjadi kota, namun juga telah menyebabkan kekumuhan seiring dengan kepadatan penduduk akibat migrasi sosial masyarakat dari luar Sulawesi Tengah.

Sejarah perkembangan Sulawesi Tengah juga diwarnai oleh kejadian bencana baik alam maupun non alam (sosial). Bencana alam menjadi bagian dari fenomena sosial Sulawesi Tengah, ini ditandai dengan penamaan wilayah, tempat, atraksi budaya bagi masyarakat lokal, seperti: kampung *nalodo* (tanah yang tenggelam), *tanahruntuh* (tanah yang runtuh), *rogo* (hancur), *beka* (tanah terbelah) dan *to palu'e* (tanah yang terangkat). Penamaan ini merupakan konstruksi kehidupan yang dihadapi masyarakat sebagai konsekuensi wilayah yang dilalui oleh sesar Palu Koro. Nilai-nilai penjagaan konflik di Sulawesi Tengah merupakan elemen pokok yang dibangun dari kebudayaan sebagaimana slogan lokal, seperti: *Sintuwu maliuntinuvu* yang dimaknai untuk selalu satu, damai, dalam bermasyarakat agar tercipta hubungan yang aman dan sejahtera dalam warga. *Sintuwu Maroso* yang dimaknai bersatu kita kuat.

Perjalanan sejarah dari masa ke masa sebagaimana tergambar dari perubahan sosial masyarakat Sulawesi Tengah yang dikisahkan oleh para sejarawan dan peneliti di atas, maka pengembangan kurikulum program studi ilmu pemerintahan diarahkan untuk memahami sejarah, belajar dari sejarah, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi perkembangan zaman. Kurikulum Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Untad harus mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

#### 1.5. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam pengembangan kurikulum ilmu pemerintahan FISIP Untad:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Landasanlandasan hukum dari rekonstruksi kurikulum secara lengkap dijabarkan sebagai berikut.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang

- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 15. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
- 16. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
- 17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Penedidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 18. Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako No 2934/UN28/KP/2013 Tentang Penetapan Siklus Peninjauan Kurikulum dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
- 19. Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako No 4596/UN28/KL/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Tadulako.
- 20. Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako No 1349/UN28/KR/2015 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Perguruan Tinggi Berorientasi KKNI di Universitas Tadulako.

21. Keputusan Rektor Untad No. 1319/ UN.28/ KR/2024, Penetapan SKS Mata Kuliah Wajib Nasional, Umum, Dan Sains Dasar di Lingkungan Untad

Landasan yuridis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat pengertian kurikulum pendidikan tinggi pada pasal 35 ayat 1 sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum yang dikembangkan prodi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Menteri. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI telah diatur melalui Peraturan Presiden No. Tahun 2012.

Pengembangan kurikulum juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan, pada saat ini Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku adalah Permendikbud No. 03 Tahun 2020 menggantikan Permenristekdikti No 44 tahun 2015. Standar Proses yang ada dalam SN-Dikti menjadi dasar kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Perguruan Tinggi. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studinya dan diorientasikan untuk mendapatkan keterampilan abad 21 yang diperlukan di era Industri 4.0 antara lain komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, juga logika komputasi dan kepedulian.

Peran penting kurikulum dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi juga diatur dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Kebijakan terbaru adalah melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Universitas Tadulako memiliki visi, misi, tujuan dan strategi serta nilai nilai yang dikembangkan untuk mewujudkan keunggulan lulusannya.

Dinamika perkembangan keilmuan pemerintahan terwadahi melalui Kesatuan Program Studi ilmu pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) sebagai organisasi yang menghimpun seluruh program studi Ilmu pemerintahan di Indoensia. Melalui workshop kurikulum yang dilaksanakan dilakukan perubahan mendasar kurikulum yang berorientasi pada outcome base education (OBE) yang mangadaptasi kebijakan Merdeka Belajar kampus merdeka (MBKM).

#### 2. VISI DAN MISI PS (S1) ILMU PEMERINTAHAN

Visi

"Unggul dan Bertaraf Internasional Dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan Yang Adaptif Dengan Perubahan Berwawasan Lingkungan Melalui Pendidikan,

Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat".

#### Misi

- 1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pemerintahan yang unggul bertaraf internasional dan adaptif dengan fenomena perubahan lingkungan hidup lokal dan global.
- 2. Melaksanakan penelitian sesuai dengan perkembangan ilmu pemerintahan, kolaboratif dengan peneliti nasional dan internasional berwawasan lingkungan yang diadaptasikan untuk kemajuan daerah nasional.
- 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat pada bidang pemerintahan berbasis hasil kajian dan inovasi penelitian sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yang responsif.
- **4.** Mendorong terwujudnya atmosfir birokrasi pemerintahan yang reformis dan adaptif terhadap perubahan menuju Indonesia maju.

#### 3. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Praktisi Pemerintah	Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai praktisi pemerintah pada lembaga pemerintahan baik Pusat maupun Daerah.
2	Analis Kebijakan	Lulusan Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai analis kebijakan pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan sektor publik dan swasta.
3	Analis perencana	Lulusan Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai analis perencana bidang kepemerintahan
4	Peneliti/asisten peneliti	Lulusan Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai peneliti/asisten peneliti bidang pemerintahan
5	Fasilitator pemberdayaan	Lulusan Ilmu Pemerintahan mampu mengaplikasikan ilmunya sebagai penggerak pada organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan,

	pengurus partai p	olitik,	dan LSM.	

#### 4. BAHAN KAJIAN

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
BK 1	Politik dan Konflik	Mengkaji tentang politik, kepemiluan, demokrasi, kepemimpinan pemerintahan, teori dan konsep konflik, typologi konflik, implikasi konflik, tata kelola konflik dan pencegahan serta dinamika politik dan konflik di Indonesia.
BK 2	Kebencanaan	Mengkaji tentang bencana, bentuk bencana alam dan non-alam, pengelolaan bencana, bencana, kegiatan pencegahan bencana, mitigasi, penanganan, rekonstruksi bencana, kebencanaan di Indonesia, strategi manajemen bencana dan dinamika kebencanaan local, nasional, dan global.
BK 3	Lingkungan	Mengkaji fenomena lingkungan local, nasioanal dan global, strategi pembangunan berkelanjutan, ekologi pemerintahan, perencanaan Pembangunan, pengeloaan sumber daya alam, dan penataan ruang.
BK 4	Pemerintahan	Mengkaji teori, konsep, bentuk kekuasaan dan kewenangan pemerintah, dasar pemerintahan, kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif dan auxiliary state, sistem dan tata kelola pemerintahan pusat dan daerah serta teknik-teknik pemerintahan.
BK 5	Desa	Mengkaji tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, BUMDES, Pilkades, desa adat, digitalisasi, inovasi desa, otonomi desa dan kelembagaan desa.
BK 6	Keuangan Daerah	Mengkaji teori dan konsep mengenai desentralisasi fisikal, tata kelola keuangan pemerintahan daerah dan penyalahgunaan keuangan daerah.
BK 7	Konstitusi	Kajian ini memberikan pengetahuan yang menyeluruh mengenai hukum yang berlaku di Indonesia sebagai satu kesatuan sistem dilihat dari segi yuridis, sosiologis dan filosofis selain itu menguraikan hal- hal yang berkaitan dengan konstitusi dan konstitusionalisme termasuk didalamnya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia. serta berkaitan dengan hukum tata pemerintahan.

BK 8	Pemerintahan local	Mengkaji teori dan konsep pemerintahan lokal, politik lokal, kekuatan politik lokal, dinamika, kepemimpinan, Pilkada, dan partai politik.
BK 9	Desentralisasi	Mengkaji tentang bentuk-bentuk otonomi mulai dari desentralisasi, dekosentrasi, otonomi daerah dan otonomi khusus
BK 10	Legislasi	Mengkaji tentang proses pembuatan undang-undang, perumusan kebijakan, peraturan daerah dan dinamika politik proses legislasi, struktur lembaga legislatif dan fungsi legislatif.
BK 11	Perencanaan Pembangunan	Mengkaji tentang teori sistem, pendekatan perencanaan, model perencanaan, proses perencanaan, sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan daerah, ruang lingkup perencanaan, permasalahan perencanaan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi perencanaan
BK 12	Pemberdayaan dan partisipasi	Mengkaji tentang konsep, teknik kelembagaan masyarakat, proses pemberdayaan dan partisipasi, masyarakat sipil, gender, fenomena sosial budaya yang mempengaruhi pemerintahan.
BK 13	Digital government	Mengkaji tentang teknologi informasi pemerintaham tata kelola, pemanfaatan big data dalam penyelenggaraan pemerintahan secara teoritis maupun empiris.

## 5. RUMUSAN CPL

Tabel-2: Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)						
		Sikap						
P1	Praktisi pemerintah.	S1 Bertakwa kepada Tuhan YME dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam tugas serta						
P2	Analis kebijakan.	berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan Masyarakat dan bangsa						
Р3	Analis perencana	S2 berdasarkan pancasila.  Mampu bekerjasama dan berperan sebagai						
P4	Peneliti/ asisten peneliti	warga negara yang tahu dan sadar dalam berkebangsaan, dengan menghargai						
P5	Fasilitator pemberdayaan	kemajemukan. Berkemandirian, professional dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, adab dan taat hukum dalam tata kehidupan.						
		Keterampilan Umum						

KU2	Mampu bekerja mandiri, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, terukur dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Solusi dan gagasan dibidang pemerintahan.  Mampu bertanggungjawab, berjejaring dengan baik, mengorganisir, mengkonstruksi tata kerja sistematis serta mampu mengambil Keputusan atas masalah pemerintahan yang dihadapi berdasarkan data dan perkembangan ilmu pengetahuan.  Mampu bertanggung-jawab, mandiri, dapat memberikan arah, berintegritas ilmiah, memiliki solusi serta berkemampuan dalam mengoperasionalkan teori, konsep maupun perkembangan ilmu dan teknologi modern yang berkarakter kepemimpinan dalam mengevaluasi dinamika perubahan dan adaptif terhadap perkembangan.
	Ketrampilan Khusus
KK1 KK2	Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi kemasyarakatan dan negara secara terampil sesuai tatanan hukum dan tata Kelola yang baik, serta memiliki kompetensi teknis kebijakan dalam pemetaan masalah yang mengedepankan dinamika dan nilai-nilai keilmiahan maupun kearifan local Masyarakat.  Mampu berbicara, berdiplomasi, berjejaring melahirkan ide, dan mewujudkan gagasan dalam merencanakan kepentingan berbasis data dan informasi dan kebutuhan Masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik dengan caracara ilmiah.  Mampu menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk Analisa keadaan local, regional, global penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki integritas, kapasitas pengendalian diri dalam menyelesaikan berbagai konflik serta memiliki kemampuan strategis didukung jejaring kerja dalam menyelesaikan masalah secara professional.
PP1	Penguasaan Pengetahuan  Menguasai konsep dasar, teori social, politik, pemerintahan, negara, demokrasi, tata Kelola, birokrasi, sektor public, Sejarah pemerintahan, kepemiluan, kebencanaan, Masyarakat sipil dan lingkungan,
	,g,

PP2	Menguasai konsep dan praktik Hukum pemerintahan, implikasi dan dinamika pemerintahan, local, nasional dan global, fenomena kebudayaan, strategi dan metode keilmuan dan metodologi pemerintahan, civil society, perencanaan dan Pembangunan, metode penelitian, internet of things, big data.
PP3	Menguasai Konsep, teori dan praktik politik, kebijakan, tata Kelola keuangan, sumber daya pemerintahan, monitoring dan evaluasi, pemberdayaan, manajemen kebencanaan, pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, demokrasi, kepemiluan, kewenangan, hukum pemerintahan, hubungan antar kelembagaan pemerintahan dan teknologi pemerintahan serta pengelolaan konflik.

## 6. PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS

	CPL Prodi	BK1	ВК2	вк3	BK4	BK5	ВК6	BK7	ВК8	ВК9	BK10	BK11	BK12	BK13
Sik	ар													
S1	Bertakwa kepada Tuhan YME dan menjunjung nilai kemanusiaan dalam tugas serta berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan Masyarakat dan bangsa berdasarkan pancasila.	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	√	√	√

S2	Mampu bekerjasama dan berperan sebagai warga negara yang tahu dan sadar dalam berkebangsaan, dengan menghargai kemajemukan.	$\checkmark$		√	√	$\checkmark$	<b>√</b>	$\checkmark$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V	V	$\checkmark$	√
S3	Berkemandirian, professional dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral, adab dan taat hukum dalam tata kehidupan.	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Ketera	ampilan Umum			ı	ı		,				ı	1		1
KU1	Mampu bekerja mandiri, berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif, terukur dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan Solusi dan gagasan dibidang pemerintahan.	$\checkmark$	$\sqrt{}$	V	V	<b>√</b>	V	$\checkmark$	$\checkmark$	<b>√</b>	V		<b>√</b>	$\checkmark$
KU2	Mampu bertanggungjawab, berjejaring dengan baik, mengorganisir, mengkonstruksi tata kerja sistematis serta mampu mengambil Keputusan atas masalah pemerintahan yang dihadapi berdasarkan data dan perkembangan ilmu pengetahuan.	$\checkmark$	V	√	V	$\checkmark$	V	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	V	$\checkmark$	√
KU3	Mampu bertanggung-jawab, mandiri, dapat memberikan arah, berintegritas ilmiah, memiliki solusi serta berkemampuan dalam mengoperasionalka n teori, konsep maupun perkembangan ilmu dan teknologi modern yang berkarakter kepemimpinan dalam	$\checkmark$		V	V	$\checkmark$	V	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	

	mengevaluasi dinamika perubahan dan adaptif terhadap perkembangan.													
Ketrar	npilan Khusus													
KK1	Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi kemasyarakatan dan negara secara terampil sesuai tatanan hukum dan tata Kelola yang baik, serta memiliki kompetensi teknis kebijakan dalam pemetaan masalah yang mengedepankan dinamika dan nilainilai keilmiahan maupun kearifan local Masyarakat.	$\checkmark$	<b>√</b>	√	√									
KK2	Mampu berbicara, berdiplomasi, berjejaring melahirkan ide, dan mewujudkan gagasan dalam merencanakan kepentingan berbasis data dan informasi dan kebutuhan Masyarakat untuk bisa menjadi lebih baik dengan caracara ilmiah.	$\checkmark$	V	V	V	$\checkmark$	V	$\checkmark$	$\checkmark$	V	$\checkmark$	V	V	$\checkmark$
ККЗ	Mampu menggunakan, memanfaatkan teknologi informasi untuk Analisa keadaan local, regional, global penyelenggaraan pemerintahan dan memiliki integritas, kapasitas pengendalian diri dalam menyelesaikan berbagai konflik	V	V	V	V	V	V	$\checkmark$	$\checkmark$	V	$\checkmark$			$\checkmark$

i	l	Ī	İ	İ	ĺ	i	İ	Ì	İ	İ	İ	ĺ	İ	j i
	serta memiliki													
	kemampuan strategis didukung													
	jejaring kerja dalam													
	menyelesaikan													
	masalah secara													
	professional.													
Pengu	asaan Pengetahuan	ı	ı	T	ı	ı			T	ı				
PP1	Menguasai konsep dasar, teori social, politik, pemerintahan, negara, demokrasi, tata Kelola, birokrasi, sektor public, Sejarah pemerintahan, kepemiluan, kebencanaan,	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		<b>√</b>			$\checkmark$	$\checkmark$	$\sqrt{}$	$\checkmark$	√	√	√
	Masyarakat sipil													
	dan lingkungan,													
PP2	Menguasai konsep dan praktik Hukum pemerintahan, implikasi dan dinamika pemerintahan, local, nasional dan global, fenomena kebudayaan, strategi dan metode keilmuan dan metodologi pemerintahan, civil society, perencanaan dan Pembangunan, metode penelitian, internet of things, big data.	√	√	$\checkmark$	√	√	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	√	√	√	√	√
PP3	Menguasai Konsep, teori dan praktik politik, kebijakan, tata Kelola keuangan, sumber daya pemerintahan, monitoring dan evaluasi, pemberdayaan, manajemen kebencanaan, pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, demokrasi, kepemiluan, kewenangan, hukum pemerintahan, hubungan antar kelembagaan	V	V	$\checkmark$	V	$\checkmark$	V	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	V	$\checkmark$	<b>√</b>

pemerintahan dan							l
teknologi							l
pemerintahan serta							l
pengelolaan konflik.							l

## 7. Sebaran Mata Kuliah Ps (S1) Ilmu Pemerintahan

		SEMESTER I	
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	U00131002	Pendidikan Pancasila	2
2	B04231001	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	3
3	B0415102	Pengantar Ilmu Politik	3
4	B04231002	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	3
5	U00131009	Bahasa Inggris	2
6	U00131003	Bahasa Indonesia	2
7	U00131001	Pendidikan Agama	2
8	U00131005	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi	2
9	B0015101	Ko-Kurikuler I (Beladiri Karate) Praktikum	1
		Jumlah	20
		SEMESTER II	
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0415103	Sistem Politik Indonesia	3
2	U00131004	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	U00131007	Kewirausahaan (Praktikum)	2
4	B04231003	Pemerintahan Nasional	3
5	B04231004	Sosiologi Pemerintahan	3
6	B0415134	Filsafat Ilmu	3
7	B0015102	Kokurikuler II (Praktikum)	1
8	B04241001	Politik Lingkungan (PPL)	3
		Jumlah	20
	<u> </u>	SEMESTER III	
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	U00131008	Kajian Lingkungan Hidup (Praktikum)	2
2	B04231005	Hukum Pemerintahan (PPL)	3
3	B04231006	Pemerintahan Daerah	3
4	B0415117	Pemerintahan Desa (PPL)	3
5	B0415123	Etika Pemerintahan	3

6	B04231007	Birokrasi Pemerintahan	3
7	B0415132	Metodologi Ilmu Pemerintahan	3
8	B0415130	Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan (Praktikum)	3
		Jumlah	23
		SEMESTER IV	
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B04231008	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	3
2	B04231009	Global Governance & Perbandingan Pemerintahan	3
3	B04231010	Digital Government (PPL)	3
4	B0415115	Tata Kelola SDM Pemerintahan	3
5	B04231011	Pelayanan Sektor Publik	3
6	B04231012	Perencanaan Pembangunan (PPL)	3
7	B0415116	Kepemimpinan Pemerintahan	3
8	B04231013	Kebijakan Sektor Publik	3
		Jumlah	24
		SEMESTER V	
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B04231014	Tata Kelola Penanggulangan Bencana (PPL)	3
2	B0415133	Ekologi Pemerintahan	3
3	B04231015	Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Praktikum)	3
4	B0415108	Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia	3
5	B04231016	IoT & Big Data (Praktikum)	3
6	B4015106	Kajian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPL)	3
7	B04241002	Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan	3
8		Pilihan	3
		Jumlah	24
		SEMESTER VI	
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0415118	Pengambilan Keputusan Stratejik	3
2	B0415125	Pemerintahan dan Politik lokal	3
3	B0415114	Manajemen Konflik	3
4	B0415113	Kajian Good Governance	3
5	B04231017	Civil Society & Demokrasi (PPL)	3
6	B04231018	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan (PPL)	3
7		Pilihan	3
		Jumlah	21

		SEMESTER VII		
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah		Jumlah SKS
1	B0015103	Kuliah kerja nyata (KKN)		4
2	B04231019	Penelitian Mandiri & Proposal Karya Ilmiah		2
3		Pilihan		3
			Jumlah	9
		0-11-0 1////		
		SEMESTER VIII		
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah		Jumlah SKS
1	B0015104	Skripsi		4
			Jumlah	4
		TOTAL SKS		145

		MATA KULIAH PILIHAN	
No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS
1	B0415112	Kajian Organisasi Sosial Politik Indonesia	3
2	B04231020	Kajian Kelembagaan Masyarakat Lokal	3
3	B04231021	Statistik dan Data Science	3
4	B0415135	Psikologi Pemerintahan	3
5	B04241003	Resolusi Konflik	3
6	B04231022	Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang Jasa	3
7	B04231023	Studi Gender	3
8	B04231024	Kajian Kedaruratan Bencana	3
9	B0415129	Seminar Masalah pemerintahan	3
		Jumlah	27

## 8. Organisasi Mata Kuliah Program Studi

**Tabel 8.1. Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi** 

_				•																
Sm	r	SKS	Jumlah								KELOMI	POK MATA KUI	IAH							
			MK				Wajib							Pilihan				MKDU	J	
VIII		4	1	Skripsi/ Tugas Akhir																
VII		9	3	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Penelitian Mandiri & Proposal Karya Ilmiah							Studi Gender	Kajian Kedaruratan Bencana	Seminar Masalah pemerintahan						
Smt	r	SKS	Jumlah		KELOMPOK MAT A KULIAH															
ĺ	Ì		MK				Wajib							Pilihan				MKDU		

VI	21	7	Pengambilan Keputusan Stratejik	Pemerintahan dan Politik Lokal	Manajemen Konflik	Kajian Good Governance	Civil Society & Demokrasi	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan				Resolusi Konflik	Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang Jasa							
v	24	8	Tata Kelola Penanggulangan Bencana	Ekologi Pemerintahan	Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif	Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia	IoT & Big Data	Kajian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Tata kelola komunikas i pemerinta han		Organisasi Sosial Politik	Kajian Kelembagaan Masyarakat Lokal	Statistik dan Data Science							
Smtr	SKS	Jumlah			ļ.					KELOM	POK MAT A KUL	IAH		ļ						
ĺ		MK				Wajib							Pilihan				MKDU	J		
IV	24	8	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	Global Governance & Perbandingan Pemerintahan	Digital Government	Tata Kelola SDM Pemerintahan	Pelayanan Sektor Publik	Perencanaan Pembangunan	Kepemi mpinan Pemerint ahan	Kebijaka n Sektor Publik										
ш	23	8	Hukum Pemerintahan	Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Desa	Elika Pemerinatahan	Birokrasi Pemerintahan	Metodologi Ilmu Pemerint ahan	Metode Penelitia n Ilmu Pemerint ahan							Kajian Lingkungan Hidup				
Smtr	SKS	Jumlah						ļ		KELOM	POK MATA KUL	IAH		!						
		MK				Wajib								Pilihan				MKDU		
п	20	9	Pemerintahan Nasional	Sosiologi Peme	rintahan Filsafat Ilmi	u Ko Kurikuler II	Politik lingkungan	Sistem politik indonesia								Kewiraus ahaan	Pendidikan Kewargane graan			
I	20	8	Dasar-Dasar Ilmu Sosial	Pengantar Ilm	u Politik Dasar-Da Peme	asar Ilmu Ko Kurikuler irintahan (Bela Diri Karate)										Pendidikan Pancasila	Bahasa Inggris	Pendidikan Agama	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi	Bhs. Indonesia

#### 9. Struktur Kurikulum

Susunan daftar mata kuliah yang direncanakan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Tadulako yang ditawarkan ditiap semester:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Kuliah Kompetensi	(	ot Kro (sks)		arsi Kredit ke Jam	P	Capa embe Lulu	lajara		RPS	le Pembelajaran	ngan (pelaksanaan dalam PT Pengusul)	gan (pelaksanaan Luar PT Pengusul)
			Mata F	Kuliah/ Ceramah/	Seminar	Praktikum/ Praktik/ Praktik Lapangan	Konversi	Sikap	Pengetahu an	Keterampil an Umum	Keterampilan Khusus		Metode	Keterangan MBKM dalan	Keteran MBKM di
1	U00131002	Pendidikan Pancasila		2	0	0	1,5	√	<b>V</b>	<b>V</b>		<b>V</b>	Kuliah	Tidak	Tidak

2	B04231001	Dasar-Dasar Ilmu Sosial		3	0	0	2,15	<b>√</b>	√	√		$\checkmark$	Kuliah	Tidak	Tidak
3	B0415102	Pengantar Ilmu Politik		3	0	0	2,15	√	<b>V</b>	<b>V</b>		√	Kuliah	Tidak	Tidak
4	B04231002	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan		3	0	0	2,15	$\sqrt{}$	√	√		$\sqrt{}$	Kuliah	Tidak	Tidak
5	U00131009	Bahasa Inggris		1	0	1	2,15	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		V	Kuliah, Praktikum	Ya	Tidak
6	U00131003	Bahasa Indonesia		1	0	1	2,15	<b>√</b>	<b>√</b>	1		<b>V</b>	Kuliah, Praktikum	Ya	Tidak
7	U00131001	Pendidikan Agama		1	0	1	2,15	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		<b>V</b>	Kuliah, Praktikum	Ya	Tidak
8	B0015101	Ko-Kurikuler I (Beladiri Karate)		0	0	1	45	√	√		<b>√</b>	<b>V</b>	praktek	Ya	Ya
9	U00131005	Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi (dr smster 2)		2	0	0	1,5	<b>√</b>	V	V		<b>√</b>	kuliah	Ya	Tidak
	Total Se	emester 1		16	0	4									
1	B0415103	Sistem Politik Indonesia		2	1	0		√	√	1	<b>√</b>	$\sqrt{}$	Kuliah	Tidak	Tidak
2	U00131004	Pendidikan Kewarganegaraan		2	0	0		<b>V</b>	√	<b>√</b>		<b>V</b>	Kuliah	Ya	Ya
3	U00131007	Kewirausahaan /Praktek		1	0	1		<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>		√	Kuliah	Tidak	Tidak
4	B04231003	Pemerintahan Nasional (KAPSIPI)	Ya	2	1	0		<b>√</b>	V	V		<b>√</b>	Kuliah	Tidak	Tidak
5	B04241001	Politik Lingkungan /PPL	Ya	1	1	1		<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	Kuliah	Ya	Ya
6	B04231004	Sosiologi Pemerintahan	Ya	2	1	0		<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>		<b>V</b>	Kuliah	Tidak	Tidak
7	B0415134	Filsafat Ilmu		3	0	0			1	√		$\sqrt{}$	Kuliah	Tidak	Tidak
8	B0015102	Kokurikuler II		0	0	1		√	√	√		$\sqrt{}$	Kuliah	Tidak	Tidak
	Total Se	emester 2		13	4	3									
1	U00131008	Kajian Lingkungan Hidup/Praktek	Ya	1	0	1		<b>V</b>	√	√	<b>V</b>	<b>V</b>	Kuliah	Ya	Ya
2	B04231005	Hukum Pemerintahan (PPL)	Ya	1	1	1		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	Kuliah, PPL	Ya	Ya

3	B04231006	Pemerintahan Daerah	Ya	2	1	0	√	√	√		$\checkmark$	Kuliah	Tidak	Tidak
4	B0415117	Pemerintahan Desa (PPL)	Ya	1	1	1	√	√	√	<b>V</b>	<b>V</b>	Kuliah, PPL	Ya	Ya
5	B0415123	Etika Pemerintahan (KAPSIPI)	Ya	2	1	0	√	√	<b>√</b>	V	<b>√</b>	Kuliah,	Ya	Ya
6	B04231007	Birokrasi Pemerintahan	Ya	2	1	0	√	$\checkmark$	√		$\checkmark$	Kuliah		
7	B0415132	Metodologi Ilmu Pemerintahan	Ya	2	1	0	1	<b>√</b>	√	<b>√</b>	<b>√</b>	Kuliah		
8	B0415130	Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan	Ya	1	1	1	V V V V		V	Kuliah, Praktikum	Ya	Ya		
	Total Se	emester 3		12	7	4	l							
1	B04231008	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	Ya	2	1	0	√	√	√	<b>√</b>	<b>V</b>	Kuliah,	Ya	Ya
2	B04231009	Global Governance & Perbandingan Pemerintahan	Ya	2	1	0	V	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	Kuliah,	Ya	Ya
3	B04231010	Digital Government (PPL)	Ya	1	1	1	<b>V</b>	√	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	Kuliah, PPL	Ya	Ya
4	B0415115	Tata Kelola SDM Pemerintahan	Ya	2	1	0	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	Kuliah	Ya	Ya
5	B04231011	Pelayanan Sektor Publik	Ya	2	1	0	√	√	√	√	<b>√</b>	Kuliah	Ya	Ya
6	B04231012	Perencanaan Pembangunan (PPL)	Ya	1	1	1	V	V	√	<b>√</b>	<b>V</b>	Kuliah, PPL	Ya	Ya
7	B0415116	Kepemimpinan Pemerintahan	Ya	2	1	0	√	$\checkmark$	√	$\checkmark$	$\checkmark$	Kuliah	Ya	Ya
8	B04231013	Kebijakan Sektor Publik	Ya	2	1	0	<b>√</b>	√	√	<b>√</b>	<b>√</b>	Kuliah	Ya	Ya
	Total Se	emester 4		14	8	2								
1	B04231014	Tata Kelola Bencana/PPL		1	1	1	√	√	√	√	√	Kuliah, PPL		
2	B0415133	Ekologi Pemerintahan		2	1	0	√	√	√	√	√	Kuliah	Ya	Ya
3	B04231015	Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Praktek)		1	1	1	<b>V</b>	√	<b>V</b>	V	V	Kuliah,	Ya	Ya
4	B0415108	Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia		2	1	0	√	√	√	√	√	Kuliah,	Ya	Ya
5	B0415113	Kajian Good Governance		2	1	0	√	√	√	√	√	Kuliah,		

6	B4015106	Kajian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat (PPL)		1	1	1	√	V	<b>V</b>	V	V	Kuliah		
7	B04241002	Tata Kelola Komunikasi Pemerintahan		2	1	0	√	<b>V</b>	√	<b>√</b>	√	Kuliah,	Ya	Ya
8		Pilihan		3	0	0	$\checkmark$	√	√	$\sqrt{}$		Kuliah,	Ya	Ya
	Total So	emester V		14	7	3								
1	B0415118	Pengambilan Kebijakan Stratejik		3	0	0	√	√	√	<b>√</b>	√	Kuliah, Praktikum	Ya	Ya
2	B0415125	Pemerintahan dan Politik Lokal		3	0	0	1	√	√		√	Kuliah		
3	B0415114	Manajemen Konflik		3	0	0	<b>V</b>	√	√		√	Kuliah		
4	B04231016	loT & Big Data (Praktek)		2	0	1	<b>V</b>	<b>V</b>	√		√	Kuliah		
5	B04231017	Civil Society & Demokrasi		3	0	0	√	√	√		√	Kuliah		
6	B04231018	Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan/PPL		1	1	1	√	√	√	V	$\sqrt{}$	Kuliah, PPL		
7		Pilihan		3	0	0						Praktikum		
	Total Se	emester VI		18	1	2								
1	B0015103	Kuliah kerja nyata (KKN)		0	1	3	1	√	√	<b>√</b>	√	Kuliah, Ya Ya		Ya
2	B04231019	Penelitian Mandiri & Proposal Karya Ilmiah		0	1	1	√	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	Kuliah	Ya	Ya
3		Pilihan		3	0	0	<b>√</b>	<b>V</b>	V	√	√	Kuliah	Ya	Ya
	Total Se	mester VII		3	2	4								
												Kuliah,		
1	B0015104	Skripsi		0	2	2	√	√	√	√	√	Praktikum	Ya	Ya
	Total Semester VIII			0	2	2								
	Mata Kuliah Pilihan													
1	B0415112	Kajian Organisasi Sosial Politik Indonesia		2	1	0	<b>√</b>	V	<b>V</b>	<b>V</b>	V	Kuliah	Ya	Ya

2	B04231020	Kajian Kelembagaan Masyarakat Lokal	1	1	1		√	√	√	√	<b>√</b>	Kuliah	Ya	Ya
3	B04231021	Statistik dan Data Science	1	1	1		<b>V</b>	√	√	<b>V</b>	<b>√</b>	Kuliah	Ya	Ya
4	B0415135	Psikologi Pemerintahan	2	1	0		<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	Kuliah	Ya	Ya
5	B04241003	Resolusi Konflik	2	1	0		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	<b>V</b>	Kuliah	Ya	Ya
6	B04231022	Manajemen Logistik dan Pengadaan Barang Jasa	1	1	1		<b>V</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	Kuliah	Ya	Ya
7	B04231023	Studi Gender	2	1	0		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	√	<b>√</b>	Kuliah	Ya	Ya
8	B04231024	Kajian Kedaruratan Bencana	1	1	1		√	√	√	√	<b>√</b>	Kuliah	Ya	Ya
9	B0415129	Seminar Masalah pemerintahan	1	2	0		<b>√</b>	<b>V</b>	√	<b>V</b>	~	Kuliah	Ya	Ya
	Tota	al SKS	13	10	4									
	Jui	mlah	145		·	_								

## 10. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian Dan Materi Pembelajaran

No	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	Bob ot SKS	CPL yang dibebankan	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran
1	U0013 1002	Pendidi kan Pancasi la	2	SIKAP: S2, S3,S4, S5, S6, S7,S8  KETERAMPILAN UMUM: KU1 KETERAMPILA N KHUSUS: KK14,KK15 PENGETAHUA N P1,P3	Bahan Kajian: BK1,BK2 Materi Pembelajaran:  1. landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila 2. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia 3. Pancasila sistem filsafat Pancasila sebagai etika politik dan ideologi nasional. 4. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan R.I. 5. Pancasila sebagai

	I	1		T	norodiamo kohidunon
					paradigma kehidupan
					dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara
2	B0423	Dasar-	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
-			3	S4,, S5	BK9
	1001	Dasar		KETERAMPILAN	Materi Pembelajaran:
		llmu		UMUM: KU1,KU3	1. Teori Politik
		Sosial		KETERAMPILAN KHUSUS:	Filsafat Politik Plato
		Oosiai		KK12,KK13	Filsafat Politik Aristoteles
				, -	4. Pemikiran Politik John Locke
				PENGETAHUAN:	5. Liberalisme
					6. Sosialisme
				PP1,PP3,PP10	7. Marxisme Dan Komunisme
					8. Sosial Demokrat
					9. Demokrasi
					10. Teori pilihan rasional formal
					11. Teori sistem dan sistem politik 12. Civil Society
					13. Feminisme dalam ilmu politik.
3	D0445	Dongon	2	SIKAP:	Bahan Kajian:
	B0415	Pengan	3	S4	BK 9
	102	tar Ilmu		KETERAMPILAN UMUM:	Materi Pembelajaran:
		Politik		KU1,KU3,KU5	Konsep-konsep Dasar
				KETERAMPILA	dalam Ilmu Politik
				N KHUSUS:	Pendekatan- pendekatan da
				KK13	3. Konsep negara dan
				PENGETAHUAN:	kekuasaan
				PP1,PP3,PP7,PP16	4. lembaga legislatif dan <i>trias</i>
					politica
					<ol><li>Lembaga Yudikatif</li></ol>
					6. Partai Politik dan
					Sistem Kepartaian
					7. Partisipasi Politik,
					8. Pemilu dan Sistem Pemilu
					9. Ideologi politik
					10. Hak Asasi Manusia
4	B0423	Dasar-	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
	1002	Dasar		S9	BK 9
	. 552	Ilmu		KETERAMPILAN UMUM:	Materi Pembelajaran
		-		KU1,KU3,KU5	Konsep dasar Ilmu
		Pemeri		KETED ANDU AND KUNDUS	Pemerintahan
		ntahan		KETERAMPILAN KHUSUS:	2. Pengertian, obyek
				KK13,KK15 PENGETAHUAN:	dan ruang lingkup
				PP1,PP3,PP4,PP10	ilmu pemerintahan
					Teori dasar Bentuk & Sistem
					Pemerintahan
					Hubungan ilmu
					pemerintahan dengan ilmu
					lain
					5. Teori Kekuasaan,
					Kewenangan & Legitimasi
					6. Struktur Pemerintah umum

	T	1	1		
					7. Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan 8. Problematika dan penelitian pemerintahan 9. Tantangan dan Masa Depan Ilmu Pemerintahan
5	U0013	Bahasa	2	SIKAP:	Bahan
	1009	Inggris		S5 KETERAMPILAN UMUM: KU13	Kajian: BK2
				RETERAMPILAN UMUM. NOTS	Materi Pembelajaran:
				KETERAMPILAN KHUSUS: KK5	Bahasa inggris akademis     Keterampilan berbicara dan diskusi
				PENGETAHUAN: PP13	3. Kosa kata khusus ilmu
					pemerintahan
					4. Kebijakan dan analisis teks
					5. Keterampilan menyimak
			_	011/4 7 04	6. Penyuntingan dan revisi teks
6	U0013	Bahasa	2	SIKAP: S4	Bahan Kajian:
	1003	Indones		KETERAMPILAN UMUM: KU4	BK1,BK2 Materi Pembelajaran:
		ia		TETERAM IEAR OMOM. NOT	Peranan dan fungsi bahasa
				KETERAMPILAN KHUSUS: KK5	Indonesia
					2. Ragam Bahasa EYD dan
				PENGETAHUAN: PP13	Tanda Baca
					Kalimat efektif
					4. Kutipan
					5. Abstrak dan daftar pustaka
					kegiatan menulis di perguruan tinggi
7	U0013	Pendidi	2	SIKAP:	Bahan Kajian:
	1001	kan	_	S1,S2,S5	BK1
	1001			KETERAMPILAN	Materi Pembelajaran:
		Agama		UMUM: KU3	1. Fungsi Agama dalam
				KETERAMPILA	Kehidupan Manusia
				N KHUSUS: KK16	2. Dakwah dan Pemberdayaan
				PENGETAHUAN: PP22	Umat Islam Indonesia di Berbagai Bidang
					3. Sistem Ekonomi Islam
					4. Strategi Membangun
					Kerukunan Umat Beragam
					5. Islam dan budaya
					6. Islam dan pengembangan
					Islam dan Politik 7. Hukum Islam di Indonesia
8	B0015	Ko-	1	SIKAP:	Bahan Kajian:
	101	Kurikul	"	S1, S2, S3	BK6
	101			KETERAMPILAN	Materi Pembelajaran:
		er I		UMUM: KU1, KU2,	Teknik dasar karate
		(Beladir		KU5, KU10	2. Kata (form)
		i		KETERAMPILAN KHUSUS:	Kumite     Kondisi fisik dan mental
				THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
		Karate)/		KK1, KK10, KK14, KK16	5. Budaya dan etika

		(Prakte k)		PENGETAHUAN: PP27	karate 6. Demonstrasi dan kompetisi
9	B0424 1001	Politik Lingkun gan (PPL)	3	SIKAP: S2 S7, S8 KETERAMPILAN UMUM: KU5,KU11 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK16 PENGETAHUAN: PP8,PP14	Bahan Kajian: BK8 Materi Pembelajaran:  1. Pengantar ilmu kealaman 2. Teknologi dan inovasi 3. Ilmu sosial dan alam 4. Etika ilmiah dan social 5. Analisis kebijakan ilmu alam 6. Literasi sains dan masyarakat 7. Studi kasus
10	U0013 1004	Pendidi kan Kewarg anegar aan	2	SIKAP: S2, S3,S4, S5,S6, S7, S8, KETERAMPILAN UMUM:  KU1  KETERAMPILAN KHUSUS: KU14  PENGETAHUAN: PP1, PP3, PP5, PP8	Bahan Kajian: BK1,BK2 Materi Pembelajaran:  1. Konsep dasar Pendidikan Kewarganegaraan  2. Pancasila sebagai Suatu Sistem Filsafat  3. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia  4. Identitas Nasional  5. Negara  6. Konstitusi  7. Hak dan Kewajiban Warganegara  8. Demokrasi Hak Asasi Manusia  9. Otonomi Daerah (OTDA)  10. Rule of Law  11. Good Governance Geopolitik Indonesia Geostrategi Indonesia
11	U0013 1005	Pendidi kan Karakte r dan Anti Korupsi	2	SIKAP: S6,, S8 KETERAMPILAN UMUM: KU10 KETERAMPILA N KHUSUS: KK7 PENGETAHUAN: PP8,PP14	Bahan Kajian: BK8 Materi Pembelajaran: 1. Pendidikan karakter 2. Etika dan moralitas dalam pemerintahan 3. Pemberantasan korupsi 4. Hukum dan peraturan anti korupsi 5. Budaya organisasi yang bersih 6. Kesadaran dan kewaspadaan

	T	<del></del>		T	
					7. Pendidikan dan kampanye anti
					korupsi
					Penegakan hukum dan     keadilan
12	U0013	Kewirau	2	SIKAP:	Bahan Kajian:
			_		
	1007	sahaan		S6, S9, S10	BK3
		(Praktiku			
		m)		KETERAMPILAN UMUM:	Materi Pembelajaran:
				KU2, KU10	1. Pengantar kewirausahaan
				KETERAMPILAN KHUSUS:	pemerintahan  2. Identifikasi masalah dan peluang
				KETEKAMI IZAK KITOGO.	3. Pengembanagan inisiatif
				KK1, KK2	kewirausahaan <b>4.</b> Kemitraan dan jejaring
				PENGETAHUAN:	<ol><li>Komunikasi dan presentasi</li></ol>
					Etika dan tanggung jawab sosial     Studi kasus dan analisis
				PP1,PP10,PP11,PP14	7. Stadi Rasus dan anansis
13	B0423	Pemeri	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
	1003	ntahan	0	S3,S4	BK10
	1003			KETERAMPILAN	Materi Pembelajaran:
		Nasion		UMUM: KU3	<ol> <li>Bentuk-bentuk</li> </ol>
		al		KETERAMPILAN KHUSUS:	pemerintahan dan sistem
				KK13,KK15	pemerintahan
					2. Tujuan dan fungsi
				PENGETAHUAN:	pemerintahan
					Faktor lingkungan dalam
				PP1,PP4,PP6,PP16	penyelenggaraan pemerintahan
					4. Demokrasi, desentralisasi dan
					otonomi dalam
					penyelenggaraan
					pemerintahan
					5. Lembaga dan birokrasi
					Pemerintahan nasional
					6. Lembaga Legislatif
					(Parlemen: MPR, DPR, DPD),
					Eksekutif (Presiden dan
					Menteri-Menteri), Yudikatif (MK,MA, Pengadilan, dll)
					7. Hubungan pemerintah pusat
					dengan pemerintah daerah
					8. Politik dan
					kebijakan
					pemerintahan
					9. Reinventing government dan
					good governance
					10. Tantangan dan Masa Depan
4.4	110040	17.5"	•	SIV A D.	Pemerintahan Nasional
14	U0013	Kajian	2	SIKAP:	Bahan Kajian: BK9 Materi Pembelajaran:
	1008	Lingkun		S3, S5 Keterampilan	1. Pengantar
		gan		Umum: Ku5	lingkungan hidup
		94		Keterampilan	2. Prinsip-prinsip
	L			1 totorumphum	Z. I IIIOIP PIIIIOIP

15	B0423 1004	Hidup (Praktik um) Sosiolo gi Pemeri ntahan	3	Khusus: Kk3,Kk4, Pengetahuan: PP1,PP10,PP11,PP14  SIKAP: S5, S6  KETERAMPILAN UMUM: KU 10  KETERAMPILAN KHUSUS: KK 7, KK 15  PENGETAHUAN: PP 16, PP 22	ekologi 3. Perubahan iklim dan pemanasan global 4. Konservasi sumber daya alam 5. Kajian dampak lingkungan 6. Kebijakan lingkungan hidup  Bahan Kajian: BK2 Materi Pembelajaran: 1. Konsep Dasar Sosiologi 2. Teori Teori Dasar Sosiologi 3. Fondamen Masyarakat 4. Fondamen Ketidakadilan Sosial 5. Perubahan sosial 6. Institusi Sosial
16	B0415 134	Filsafat Ilmu	3	SIKAP: \$2,\$5,\$8 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU3, KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK13, PENGETAHUAN: PP12,PP13	Bahan Kajian: BK1,BK5 Materi Pembelajaran:  1. Pengertian Logika 2. Kajian Filsafat 3. Pembagian Filsafat 4. Sistematika Filsafat 5. Ilmu dan Filsafat 6. Hakikat Ilmu 7. Filsafat alam dan Filsafat Moral 8. Sejarah Perkembangan ilmu Filsafat 9. Hakekat dan Karakteristik Ilmu Pengetahuan
17	B0015 102	Kokurik uler II	1		
18	B0415 103	Sistem Politik Indones ia	3	SIKAP: \$3,\$4, KETERAMPILAN UMUM: KU1 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUAN: PP1,PP4,PP7,PP16,	Bahan Kajian: BK 9 Materi Pembelajaran: 1. Pengertian Sistem Politik 2. Elemen– elemen pokok sistem politik 3. Mekanisme sistem politik 4. Perspektif: historis; struktural- fungsional; 5. budaya politik; 6. bisnis dan politik 7. Peran Masyarakat

					Kewarganegaraan dalam
					Sistem Politik Indonesia 8. Peran Media Massa
					dalam Sistem Politik
					Indonesia
					9. Militer dalam Sistem Politik
					Indonesia
					10. Bisnis dan Politik dalam
					sistem politik Indonesia
					11. Masa depan sistem politik
					Indonesia Pengaruh
19	B0423	Hulaum	3	SIKAP:	globalisasi Bahan Kajian:
13		Hukum		S7, S8	BK 8
	1005	Pemerint		KETERAMPILAN	Materi Pembelajaran:
		ahan		UMUM: KU3,KU5	Aliran pemikiran hukum
		(PPL)		KETERAMPILA	Konsep tatanan hukum
		('' ' '-')		N KHUSUS:	Hukum sebagai persoalan keadilan
				KK2,KK4	4. hukum sebagai sarana
				PENGETAHUAN:	pembangunan
				PP8,PP14	5. Makna Politik dan hukum
					6. Politik hukum
					7. Sejarah tata hukum di Indonesia
					8. Peraturan perundang-undangan
					dan peraturan kebijaksanaan
					Politik hukum di Indonesia
			_	OUZAB	10. Menata Sistem Hukum Nasional
20	B0423	Pemeri	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
20	B0423 1006	Pemeri ntahan	3	S3 S5	Bahan Kajian: BK10
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran:
20			3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM:	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6,	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N:	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi,
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N:	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind 5. Otonomi Daerah
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind 5. Otonomi Daerah 6. Manajemen
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind 5. Otonomi Daerah 6. Manajemen Pemerintahan Daerah
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind 5. Otonomi Daerah 6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM,Keuangan
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind 5. Otonomi Daerah 6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM,Keuangan Infrastruktur dan
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind 5. Otonomi Daerah 6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM,Keuangan
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah  2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.  3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah  4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind  5. Otonomi Daerah  6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM,Keuangan Infrastruktur dan Pelayanan)  7. Organisasi Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah  2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.  3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah  4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind  5. Otonomi Daerah  6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM,Keuangan Infrastruktur dan Pelayanan)  7. Organisasi Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)  8. Pemilihan Kepala Daerah
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah  2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.  3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah  4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind  5. Otonomi Daerah  6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM,Keuangan Infrastruktur dan Pelayanan)  7. Organisasi Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)  8. Pemilihan Kepala Daerah  9. Partisipasi Masyarakat
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah  2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.  3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah  4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind  5. Otonomi Daerah  6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM,Keuangan Infrastruktur dan Pelayanan)  7. Organisasi Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)  8. Pemilihan Kepala Daerah  9. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Studi     Pemerintahan Daerah  2. Sejarah Pemerintahan     Daerah di Indonesia.  3. Teori-Teori Dalam     Pemerintahan     Daerah  4. Teori Desentralisasi,     Dekonsentrasi dan Medebewind  5. Otonomi Daerah  6. Manajemen     Pemerintahan Daerah     (SDM,Keuangan     Infrastruktur dan     Pelayanan)  7. Organisasi Pemerintahan Daerah     (Pemerintah Daerah dan DPRD)  8. Pemilihan Kepala Daerah  9. Partisipasi Masyarakat     Dalam Pemerintahan     Daerah
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah  2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia.  3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah  4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind  5. Otonomi Daerah  6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM,Keuangan Infrastruktur dan Pelayanan)  7. Organisasi Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)  8. Pemilihan Kepala Daerah  9. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah  10. Tantangan-tantangan
20		ntahan	3	S3 S5 KETERAMPILA N UMUM: KU1,KU2,KU6, KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK13 PENGETAHUA N: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19,	Bahan Kajian: BK10  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Studi     Pemerintahan Daerah  2. Sejarah Pemerintahan     Daerah di Indonesia.  3. Teori-Teori Dalam     Pemerintahan     Daerah  4. Teori Desentralisasi,     Dekonsentrasi dan Medebewind  5. Otonomi Daerah  6. Manajemen     Pemerintahan Daerah     (SDM,Keuangan     Infrastruktur dan     Pelayanan)  7. Organisasi Pemerintahan Daerah     (Pemerintah Daerah dan DPRD)  8. Pemilihan Kepala Daerah  9. Partisipasi Masyarakat     Dalam Pemerintahan     Daerah

21	B0415 117	Pemerint 3 ahan Desa (PPL)	SIKAP: S4 S5 KETERAMPILAN UMUM: KU3 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3,KK13,KK15 PENGETAHUAN: PP4,PP5,PP7,PP16,PP24	Bahan Kajian: BK 10 Materi Pembelajaran:  1. Berbagai Konsep dan
22	B0415 123	Etika 3 Pemeri ntahan	SIKAP: S1, S2,S3, S5,S7 S8 KETERAMPILA N UMUM: KU9,KU11 KETERAMPILA N KHUSUS: KK10,KK14,KK1 5,KK16 PENGETAHUA N: PP26	Bahan Kajian: BK1  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Etika Pemerintahan 2. Teori dan Obyek Kajian Dalam Pemerintahan. 3. Efektivitas Etika Pemerintahan 4. Nilai-nilai Budaya Lokal untuk Memperkuat Etika Pemerintahan 5. Kebijakan Anti Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 6. Kebijakan Anti Kolusi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 7. Kebijakan Anti Nepotisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 8. Strategi Penguatan Etika Pemerintahan 9. Tantangan-tantangan

23 B0423	lajaran: g Birokrasi erintahan endekatan i Birokrasi ean Lama emerintahan Baru
Birokra si Pemeri ntahan  Birokra si Pemeri ntahan  Birokra si Pemeri ntahan  KETERAMPILAN UMUM: KU6,KU10  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,KK13  PENGETAHUAN:  PP2,PP6.PP16  Birokrasi Pemerintahan  3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan  4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan  5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan  6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan  7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan  8. Proses Birokrasi Pemerintahan	lajaran: g Birokrasi erintahan okrasi erintahan Pendekatan li Birokrasi ean Lama emerintahan Baru
Birokra si Pemeri ntahan  Si NETERAMPILAN UMUM: KU6,KU10  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,KK13  PENGETAHUAN:  PPROGETAHUAN:  PPROGETAHUAN:  PPROGETAHUAN:  PPROGETAHUAN:  PPROGETAHUAN:  PROGETAHUAN:  PR	lajaran: g Birokrasi erintahan okrasi erintahan Pendekatan ii Birokrasi ian Lama emerintahan Baru
Si RETERAMPILAN UMUM: Remeri ntahan  Si KETERAMPILAN UMUM: KU6,KU10  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,,KK13  PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16  Si KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8, KK13  PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16  BK10  Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Birokrasi dalam Pemerintahan 2. Sejarah Birokrasi dalam Pemerintahan 3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan 4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan 5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	lajaran: g Birokrasi erintahan okrasi erintahan Pendekatan ii Birokrasi iian Lama emerintahan Baru
RETERAMPILAN UMUM: KU6,KU10  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,,KK13  PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8, KK13  PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8, KK13  PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8, KK13  PENGETAHUAN: PP3,PP6.PP16  APARAIGN BARU Birokrasi Pemerintahan PP4 Pemerintahan PP4 Pemerintahan PP5 Pemerintahan PP6 Pemerintahan PP7 Pemerintahan PP8 Pemerin	g Birokrasi erintahan okrasi erintahan Pendekatan ii Birokrasi ean Lama emerintahan Baru
Pemeri ntahan  KETERAMPILAN UMUM: KU6,KU10  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,,KK13  PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16  PP2,PP6.PP16  KETERAMPILAN KHUSUS: Atti Penting Birokrasi dalam Pemerintahan 2. Sejarah Birokrasi dalam Pemerintahan 3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan 4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan 5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	g Birokrasi erintahan okrasi erintahan Pendekatan ii Birokrasi ean Lama emerintahan Baru
ntahan  KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,,KK13  PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16  PP2,PP6.PP16  PP3,PP6.PP16  Alam Pemerintahan 3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan 4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan 5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	erintahan okrasi erintahan Pendekatan ii Birokrasi aan Lama emerintahan Baru
KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,,KK13  PENGETAHUAN: PP2,PP6.PP16  PP2,PP6.PP16  2. Sejarah Birokrasi dalam Pemerintahan 3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan 4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan 5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	okrasi erintahan Pendekatan li Birokrasi lan Lama emerintahan Baru
KETERAMPILAN KHUSUS: KK2,KK8,,KK13  PENGETAHUAN:  PP2,PP6.PP16  2. Sejarah Birokrasi dalam Pemerintahan 3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan 4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan 5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	erintahan Pendekatan ii Birokrasi ian Lama emerintahan Baru
PENGETAHUAN:  PENGETAHUAN:  PP2,PP6.PP16  3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan  4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan  5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan  6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan  7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan  8. Proses Birokrasi Pemerintahan	Pendekatan ii Birokrasi ian Lama emerintahan Baru
PENGETAHUAN:  PENGETAHUAN:  PP2,PP6.PP16  3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan  4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan  5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan  6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan  7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan  8. Proses Birokrasi Pemerintahan	Pendekatan ii Birokrasi ian Lama emerintahan Baru
PENGETAHUAN:  PP2,PP6.PP16  4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan  5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan  6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan  7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan  8. Proses Birokrasi Pemerintahan	i Birokrasi nan Lama emerintahan Baru nan
Pemerintahan  4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan  5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan  6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan  7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan  8. Proses Birokrasi Pemerintahan	an Lama emerintahan Baru an
PP2,PP6.PP16  4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan  5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan  6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan  7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan  8. Proses Birokrasi Pemerintahan	Lama emerintahan Baru nan
Birokrasi Pemerintahan  5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan  6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan  7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan  8. Proses Birokrasi Pemerintahan	emerintahan Baru an
5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	Baru an
Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	an
Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	
6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	
Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	
Pemerintahan 7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	
7. NPS (New Publik Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	•
Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	
Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan	Publik Service)
8. Proses Birokrasi Pemerintahan	krasi
	an
	krasi Pemerintahan
9. Patologi Birokrasi Pemerintahan	okrasi Pemerintahan
10. Efektivitas Birokrasi Pemerintaha	
11. Tantangan-Tantangan	
Birokrasi Pemerintahan	
12. Masa Depan Birokrasi	
Pemerintahan  Od Bodda Adda Adda Adda Adda Adda Adda Adda	
24 B0415 Metodol 3 SIKAP: Bahan Kajian:	
132 ogi Ilmu S6 S8	
KETERAMPILAN UMUM: Materi Pembelajaran:	
Pemeri   KU1,KU4,KU9   1. Ilmu Pemerintahan sebagai sua   Ilmu	rintahan sebagai suatu
KETERAMPILAN KHUSUS: 2. Perkembangan paradigmatik	ngan paradigmatik
KK4,KK13,KK15 ilmu pemerintahan	
3. Analisa konseptual	
PENGETAHUAN: Metodologi Ilmu	
Pemerintahan	
PP12,PP13 4. Ontologi, epistimologi dan	
1. 2.110.03., 50.01.110.03.	
aksiologi dari Ilmu Pemerintaha 5. Ilmu Pemerintahan sebagai sua	
	ımanan sebayar Suatu
Ilmu	
6. Perkembangan para	
digmatik ilmu pemerintahan	
7. Analisa konseptual	
Metodologi Ilmu	
Pemerintahan Pemerintahan	
8. Metode dan pendekatan	n pendekatan
kualitatif dalam Analisa	alam Analisa
pemerintahan	han

25	B0415 130	Metode Peneliti an Ilmu Pemeri ntahan	3	SIKAP: S6 S8 KETERAMPILAN UMUM: KU1,KU4,KU9  KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK13,KK15  PENGETAHUAN: PP12,PP13	Bahan Kajian: BK 5 Materi Pembelajaran:  1. Pengenalan metode penelitian 2. Desain penelitian 3. Pendekatan penelitian 4. Pengumpulan data 5. Analisis data 6. Interpretasi hasil 7. Etika penelitian 8. Presentasi dan publikasi 9. Penerapan penelitian 10. Tantangan dan peluang	
26	B0423 1008	Tata Kelola Keuang an Pemeri ntahan	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU2,KU5,,KU7,KU8, KETERAMPILAN KHUSUS: KK7,KK8, PENGETAHUAN: PP18,PP20	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran:  1. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 2. Anggaran Publik 3. Pendekatan Penyusunan Anggaran 4. Medium Term Expenditure Framework (MTEF) 5. APBN 6. Penyusunan RAPBN 7. Keuangan Daerah 8. APBD 9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 10. Penyusunan RKA SKPD 11. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 12. Desentralisasi Fiskal 13. Tantangan dan Masa Depan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	
27	B0423 1009	Global Govern ance & Perban dingan Pemeri ntahan	3	SIKAP: S5 KETERAMPIL AN UMUM: KU1 KETERAMPILAN KHUSUS: KK8,KK13,KK15 PENGETAHUAN: PP1,PP4,PP5,PP6,PP7	Bahan Kajian: BK9 Materi Pembelajaran: 1. Arti Penting Perbandingan Pemerintahan 2. Teori Perbandingan Pemerintahan 3. Teori dan Praktik Globalisasi 4. Perbandingan	

28	B0423 1010	Digital Govern ment (PPL)	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU4,KU5,,KU10,KU12 KETERAMPILAN KHUSUS: KK8,KK11,KK12 PENGETAHUAN: PP16,PP21,PP23	Sistem Pemerintahan  5. Perbandingan Bentuk Organisasi dan Struktur Pemerintahan  6. Perbandingan Fungsi Pemerintahan  7. Pemerintahan di negaranegara Maju  8. Pemerintahan di negaranegara Berkembang  9. Jejaring Pemerintahan Global  10. Tantangan dan Masa Depan Pemerintahan Global  Bahan Kajian: BK4,BK6 Materi Pembelajaran;  1. Pengertian-pengertian  2. Kemunculan e-Government  3. Tujuan, Manfaat dan Ruang lingkup e- Government  4. Fase Perkembangan e-Government  5. Dimensi dan Relasi e-Government  6. Pembentukkan Masyarakat Informasi dan Komunikasi terhadap Manajemen Pemerintahan  8. Kebijakan e-Government di Indonesia  9. Elemen-elemen Sukses e-Government  10. Kajian e-Government di Beberapa Negara  11. Inovasi
					Beberapa Negara
29	B0415 115	Tata Kelola SDM Pemeri ntahan	3	SIKAP: S3, S6, S9  KETERAMPILA N UMUM: KU2,KU5,KU10 KETERAMPILA N KHUSUS: KK1,KK3,KK7,K K13 PENGETAHUA N: PP1,PP3,PP6,PP7PP16PP21,P P24	Bahan Kajian: BK6  Materi Pembelajaran:  1. Arti Penting Tata Kelola Pemerintahan  2. Sejarah Tata Kelola Pemerintahan  3. Teori Tata Kelola Pemerintahan  4. Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Pemerintahan  5. Aktor Publik Dalam Governance  6. Aktor Privat Dalam Governance  7. Aktor Civil Sociey Dalam Governance

30	B0423 1011	Pelaya nan Sektor Publik	3	SIKAP: S3 S6 KETERAMPILAN UMUM: KU3 KETERAMPILAN KHUSUS: KK8,,KK9,KK13,KK16 PENGETAHUAN: PP2,PP6.,PP10,PP16,PP21	8. Relasi atau Media antara Aktor Publik, Privat dan Civil Society 9. Faktor-Faktor Pokok Yang Menentukan Tata Kelola Pemerintahan 10. Konteks dan Proses Dalam Tata Kelola Pemerintahan 11. Tantangan-Tantangan Dalam Tata Kelola Pemerintahan 12. Masa Depan Tata Kelola Pemerintahan 13. Konsepsi Dasar Tata kelola Pelayanan sektor Publik 14. Pendekatan dan Dimensi / Level Dalam tata kelola pelayanan sektor publik 15. Isu dalam Tata Kelola Pelayanan sektor Publik 16. Barang dan Jasa 17. Tata kelola Pelayanan Sektor Publik Dan sektor Privat 18. Kualitas Kinerja Pelayanan sektor Publik 19. Design peningkatan Kualitas Pelayanan sektor Publik 19. Inovasi Tata Kelola Pelayanan sektor Publik 19. Inovasi Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik 19. Inovasi Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik 10. Kajian Normatif Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik Di Indonesia 10. Kajian Normatif Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik Di Indonesia 10. Kajian Normatif Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik Di Indonesia 10. Kajian Normatif Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik Di Indonesia
31	B0423 1012	Perenca naan Pemban gunan (PPL)	3	SIKAP: S3,S6 KETERAMPILAN UMUM: KU5,KU7,KU8 KETERAMPILAN KHUSUS:	Publik  Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar perencanaan pembangunan 2. Konsep dasar pembangunan 3. Analisis kebutuhan dan masalah

	1	<del> </del>		INCO INCA INCO INC	1 December 1
				KK3,KK4,KK7,KK	4. Pengembangan strategi
				8 DENOCETALILIANI	pembangunan
				PENGETAHUAN:	5. Rencana tindak
				PP6,PP24	6. Monev
					<ol><li>Partisipasi masyarakat</li></ol>
					8. Pengelolaan proyek pembangunan
					9. Kebijakan pembangunan
					10. Etika dan tata Kelola pembangunan
32	B0415	Kepemi	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
			•	S9, S10	BK6
	116	mpinan		KETERAMPILAN	Materi Pembelajaran:
		Pemerint		UMUM:	Pentingnya studi
		ahan		KU1,KU2,KU7,KU	kepemimpinan dalam Ilmu
		anan		8	Pemerintahan
				KETERAMPILAN KHUSUS:	2. Konsep dan
				KK1,KK2,KK3,KK4,KK5,KK6,KK	pengertian
					Kepemimpinan
				7,KK8,K K10,KK14,KK15,KK16	pemerintahan
				PENGETAHUAN:	Teori dan pendekatan dalam
				PP4,PP5,PP6,PP9,PP10,PP16,	studi kepemimpinan
				PP22	4. Model-model kepemimpinan
					5. Kepemimpinan dalam
					organisasi sektor publik
					6. Gaya-gaya dalam
					kepemimpinan
					7. Fungsi Kepemimpinan dalam Pemerintahan
					8. Hubungan Pemimpin dan
					pengikut dalam pemerintahan
					9. Efektivitas
					Kepemimpinan
					Pemerintahan
					10. Kecakapan dan seni dalam kepemimpinan
					pemerintahan
					11. Kepemimpinan
					Pemerintahan Indonesia
					12. Kepemimpinan Pemerintahan
					dalam Penyelenggaraan
					Pemerintahan Daerah
					13. Kepemimpinan Pemerintahan
					dalam Penyelenggaraan
					Pemerintahan Desa
					14. Inovasi Kepemimpinan
1					Pemerintahan
					15. Tantangan dan Masa
					Depan Kepemimpinan
					Pemerintahan
					1 omonitarian
33	B0423	Kebijak	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
		•	_	S3 S6	BK 6
	1013	an		KETERAMPILAN UMUM:	
		Sektor		KU3,KU5,	Materi Pembelajaran
				KETERAMPILAN KHUSUS:	Materi Pembelajaran:
1				KK3,KK4,KK7	Ruang lingkup studi kebijakan
L	i			ININO,ININA	

		Publik.		PENGETAHUAN:	2	sektor publik
				PP2,PP6,PP11,PP20	2.	3 - 1
						kebijakan sektor publik
					3.	0 1
						studi kebijakan sektor publik
					4.	
						Agenda Setting
					5.	
					6.	3
					7.	,
					8.	Implementasi Kebijakan
34	D0422	Toto	3	SIKAP:	Rahan	Kajian:
	B0423	Tata	3	S3	BK6	Kajian.
	1014	Kelola		KETERAMPILAN UMUM:	_	Pembelajaran:
		Penang			1.	<u> </u>
		•		KU2,KU7,KU8,KU10	1.	bencana
		gulanga		KETERAMPILAN KHUSUS:	2.	
		n			3.	
		Bencan		KK1,KK2,KK7,KK14,KK16	٥.	penanggulangan bencana
				PENGETAHUAN:	4.	1
		a (PPL)			1.	bencana
				PP6,,PP19,PP20	5.	Koordinasi dan kolaborasi
						Komunikasi krisis
						Pemulihan pasca bencana
					8.	Studi kasus dan pembelajaran
						dari pengalaman lapangan
35	B0415	Ekologi	3	SIKAP:		Kajian:
	133	Pemeri		S5 S6, S8	BK9	
	100			KETERAMPILAN		Pembelajaran:
		ntahan		UMUM:	1.	Konsep dan
				KU1,KU3,KU10		Teori Ekologi
				KETERAMPILAN KHUSUS:		Pemerintahan
				KK3,KK4	2.	•
						pendekatan dalam studi
				PENGETAHUAN:	3	ekologi pemerintahan
				PP10,,PP16,PP22,PP24	3.	, 00
						pemerintahan dan faktor- faktor yang mempengaruhinya
					1	, , , ,
					4.	
						•
					5	
					] .	
					6.	
					0.	Pembangunan Masyarakat
					7.	
					'.	dalam perencanaan
						pembangunan
					8.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
						daya
					9.	Manusia dan dalam
					'.	penyelenggaraan
						pemerintahan Indonesia
					5.	Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Hubungan antar lembaga pemerintahan

F			1	T	
					10. Pengaruh ekologi
					pemerintahan Terhadap
				011/4.5	pewujudan Good Governance
36	B0423	Metode	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
	1015	Peneliti		S3, S6	BK5
		on		KETERAMPILAN UMUM:	Materi Pembelajaran:
		an		KU1,KU2,KU4,KU9,,KU5	Pengertian Statistika
		Kualitati		KETERAMPILAN KHUSUS:	2. Pengukuran
		f &		KK3,KK7,KK15	3. Penyajian data kualitatif
		Kuantit			Penyajian data kuantitatif
				PENGETAHUAN:	5. ukuran pemusatan dan
		atif			ukuran penyebaran
		(praktik		PP12,PP13	6. Probabilitas
		<b>`</b>			7. Penarikan sampel probablitas
		um)			8. Penarikan sampel non
					probabilitas
					9. Estimasi dan uji hipotesis
					10. Uji statistik hipotesis
					11. Uji Hipotesis Dua Rata-rata
37	D0445	0: 1		SIKAP:	Populasi  Bahan Kajian: BK9
31	B0415	Sistem	3		Materi Pembelajaran:
	108	Keparta		S3,S4, S5 KETERAMPILAN UMUM:	_
		ian dan		KU6	Sistem politik dan demokrasi di Indonesia
				KETERAMPILAN	
		Pemilu		KHUSUS: KK4,KK6,KK13	Sejarah pembentukan sistem kepartaian di Indonesia
		di		PENGETAHUAN:	3. Struktur dan peran partai politik
		Indones		I LITOLIANOAN.	4. Peraturan dan regulasi Pemilu di
				PP7,PP11.,PP16	Indonesia
		ia		117,1111.,1110	5. Sistem Pemilu di Indonesia
					<b>6.</b> Partisipasi politik dan pemilih di
					Indonesia
					7. Peran media massa dalam Pemilu
					8. Kampanye politik dan komunikasi
					pemilih
38	B0423	IoT &	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
			3	S9	BK 6
	1016	Big		KETERAMPILAN UMUM:	Materi Pembelajaran:
		Data/		KU6,KU7,KU17	1. Pengantar IoT
		PRAKTI		100,107,1017	2. Teknologi dan infrastruktur IoT
				KETERAMPILAN KHUSUS:	3. Big data dalam konteks
		KUM		KK1,KK8	pemerintahan
				INIXI,IXIXO	<b>4.</b> Analisis dan interpretasi data
				PENGETAHUAN:	5. Keamanan dan privasi data
					6. Etika dan regulasi
				PP2,PP6,PP19	7. Kasus penggunaan dan studi kasus
					8. Kolaborasi antara sektor publik dan
					swasta
					9. Dampak sosial dan lingkungan
39	B4015	Kajian	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
		-		S3,, S4, S5,, S6	BK2
	106	Pember		KETERAMPILAN UMUM:	Materi Pembelajaran:
		dayaan		KU1,KU3	Teori dan Konsep Sistem Sosial
		dan		KETERAMPILAN KHUSUS:	Budaya
		uan			Teori Ilmu Sosial dan Realitas
<u> </u>	1	1	1	1	

		Partisip asi Masyar akat (PPL)		KK3,KK13,KK15  PENGETAHUAN: PP10,,PP16,PP22,PP24	Sosial 3. Manusia Sebagai Individu Dan Makhluk Sosial 4. Manusia Sebagai Makhluk Budaya 5. Pelapisan Sosial Dan Kesamaan Derajat 6. Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan
					7. Teori-Teori Evolusi Kebudayaan 8. Manusia dan Peradaban 9. Inovasi Norma Baru 10. Teori Modernisasi 11. Warga Negara dan Negara 12. Agama Dan Masyarakat 13. Multikuluturalisme
40	B0415 118	Penga mbilan Keputu san Stratejik	3	SIKAP: S6 KETERAMPIL AN UMUM: KU 10 KETERAMPILA N KHUSUS: KK5,KK6,KK12 PENGETAHUA N: PP 10,PP 15	Bahan Kajian: BK2,BK1  Materi Pembelajaran:  1. Konsep dasar pengambilan keputusan  2. Model pengambilan keputusan  3. Teori organisasi dan pengambilan keputusan  4. Etika dalam pengambilan keputusan  5. Penggunaan data analisis  6. Kebijakan implementasi dan evaluasi
41	B0415 125	Pemeri ntahan dan Politik local	3	SIKAP: S3,S4 KETERAMPIL AN UMUM: KU10 KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK8,K K10,KK15 PENGETAHUAN: PP1,PP4,PP5,PP6,PP16,PP19, PP24	Bahan Kajian: BK9,BK 11 Materi Pembelajaran:  1. Pengantar pemerintahan dan politik lokal 2. Struktur pemerintahan lokal 3. Partisipasi masyarakat dan demokrasi lokal 4. Pemilu dan politik lokal 5. Otonomi daerah 6. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat
42	B0415 114	Manaje men Konflik	3	SIKAP: S2,S4,S5 KETERAMPIL AN UMUM: KU5 KETERAMPILAN KHUSUS: KK3,KK4,KK6,KK7,KK13,KK15, PENGETAHUAN: PP 10,PP 15	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar manajemen konflik 2. Faktor-faktor pemicu konflik 3. Strategi penyelesaian konflik 4. Metode penyelesaian konflik 5. Kebijakan konflik dan resolusi konflik 6. Keterlibatan masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik

43	B0415 113	Kajian Good Govern ance	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU3,KU6,KU12  KETERAMPILAN KHUSUS: KK9,KK11 PENGETAHUAN: PP15,PP21,PP23	<ul> <li>Bahan Kajian: BK4,BK6</li> <li>Materi Pembelajaran:</li> <li>1. Pengantar good governance</li> <li>2. Prinsip-prinsip good governance</li> <li>3. Tantangan dan hambatan dalam penetapan good governance</li> <li>4. Pengelolaan sumber daya manusia dalam pemerintahan</li> <li>5. Keterlibatan sektor swasta dan organisasi non pemerintah</li> </ul>
44	B0423 1017	Civil Society & Demokr asi (PPL)	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU2,KU7,KU8,KU10 KETERAMPILAN KHUSUS: KK1,KK2,KK7,KK14,KK16 PENGETAHUAN: PP6,,PP19,PP20	Bahan kajian: BK6 Materi pembelajaran:  1. Pengertian civil society 2. Peran civil society dalam demokrasi 3. Hubungan antara civil society dan pemerintah 4. Demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil 5. Penyelenggaran civil society 6. Etika dan tanggungjawab masyarakat sipil 7. Isu-isu kontemporer dalam masyarakat sipil 8. Pengaruh global terhadap civil society
45	B0423 1018	Monitori ng dan Evaluas i Pemeri ntahan (PPL)	3	SIKAP: S7 S9 KETERAMPILAN UMUM: KU5,KU7,KU8 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK10,,KK14, KK16 PENGETAHUAN: PP17	Bahan Kajian: BK6 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar monitoring dan evaluasi pemerintahan 2. Kerangka kerja M&E 3. Peran pemerintah dalam M&E 4. Pengembangan indikator kinerja 5. Evaluasi kebijakan dan program 6. Keterlibatan stakeholder 7. Aspek etika dalam M&E 8. Manajemen informasi dan sistem pelaporan
46	B0015 103	Kuliah kerja nyata (KKN)	4	SIKAP: S7 S9 KETERAMPILAN UMUM: KU5,KU7,KU8 KETERAMPILA N KHUSUS: KK3,KK4,KK8,K K10,KK15 PENGETAHUAN: PP16,PP22	Bahan Kajian: BK2 Materi Pembelajaran:  1. Pengabdian masyarakat 2. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat 3. Penelitian dan pengembangan lokal 4. Kewirausahaan sosial 5. Pemberdayaan masyarakat 6. Pengembangan kemampuan soft

	1		T	T	- 1-20 -
					skills
47	B0423	Peneliti	2	SIKAP:	7. Evaluasi dan pelaporan  Bahan Kajian:
٦,			2	S3,S4	BK9,BK11
	1019	an		KETERAMPIL	Materi Pembelajaran:
		Mandiri		AN UMUM:	Pengantar penelitian mandiri
		&		KU10	2. Perumusan masalah penelitian
				KETERAMPILA	3. Pengembanagn kerangka
		Propos		N KHUSUS:	konseptual
		al		KK3,KK4,KK8,K	4. Metodologi penelitian
		Karya		K10,KK15	5. Penyusunan proposal penelitian
		Ilmiah		PENGETAHUAN:	6. Tinjauan pusta dan review literature
		iiiiiiaii		PP12, PP13	<ul><li>7. Penyusunan rencana kerja</li><li>8. Etika penelitian</li></ul>
				FF12, FF13	Presentasi proposal penelitian
					<b>10.</b> Umpan balik dan revisi proposal
					11. Manajemen proyek penelitian
					<b>12.</b> Sumber daya penelitian
48	B0015	Skripsi	4	SIKAP:	Bahan Kajian: BK5
	104	J	]	S9,S10	Materi Pembelajaran:
	104			KETERAMPILAN UMUM:	Pemahaman tentang skripsi
				KU3,KU4,KU5,KU9,KU11	Penulisan skripsi     Presentasi skripsi
				KETERAMPILAN KHUSUS:	Konsultasi dan umpan balik
				KK2,KK3,KK4,KK7.KK12,KK	5. Etika penelitian
				13,KK15 PENGETAHUAN:	6. Manajemen waktu dan proyek
				PP12,PP13	
49	B0415	Kajian	3	SIKAP:	BahanKajian:
	112	Organis		S3	BK6
	112			KETERAMPILAN UMUM:	MateriPembelajaran:
		asi		KU2,KU7,KU8,KU10	Sejarah politik Indonesia
		Sosial		KETER AMBIL AN KUMOUO	Sistem politik Indonesia
		Politik		KETERAMPILAN KHUSUS:	Organisasi masyarakat
		Indones		KK1,KK2,KK7,KK14,KK16	sipil
				PENGETAHUAN:	Gerakan sosial dan politik
		ia		DDC DD40 DD90	5. Politik identitas
				PP6,PP19,PP20	6. Media massa dan politik
					7. Politik luar negeri
50	50400	1.7 11		OUCAD	indonesia
50	B0423	Kajian	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
	1020	Kelemb		S5 <b>KETERAMPILA</b>	DKO DK11
		agaan		N UMUM:	BK2,BK11
		Masyar		KU3,KU10	Materi Pembelajaran:
		1		KETERAMPILA	Pengertian Lembaga masyarakat
1		1 4		1	
		akat		N KHUSUS:	lokal
		akat Lokal		KK4,,KK13	lokal 2. Fungsi dan peran Lembaga
				KK4,,KK13 <b>PENGETAHUA</b>	Fungsi dan peran Lembaga     masyarakat lokal
				KK4,,KK13 PENGETAHUA N:	<ol> <li>Fungsi dan peran Lembaga masyarakat lokal</li> <li>Klasifikasi Lembaga masyarakat</li> </ol>
				KK4,,KK13 <b>PENGETAHUA</b>	<ul><li>2. Fungsi dan peran Lembaga masyarakat lokal</li><li>3. Klasifikasi Lembaga masyarakat lokal</li></ul>
				KK4,,KK13 PENGETAHUA N:	<ol> <li>Fungsi dan peran Lembaga masyarakat lokal</li> <li>Klasifikasi Lembaga masyarakat lokal</li> <li>Hubungan antara Lembaga</li> </ol>
				KK4,,KK13 PENGETAHUA N:	<ol> <li>Fungsi dan peran Lembaga masyarakat lokal</li> <li>Klasifikasi Lembaga masyarakat lokal</li> <li>Hubungan antara Lembaga masyarakat lokal dengan</li> </ol>
				KK4,,KK13 PENGETAHUA N:	<ol> <li>Fungsi dan peran Lembaga masyarakat lokal</li> <li>Klasifikasi Lembaga masyarakat lokal</li> <li>Hubungan antara Lembaga</li> </ol>

	T	T	1		
					masyarakat lokal
					6. Partisipasi dan keterlibatan
	50100			0114.5	masyarakat dalam Lembaga lokal
51	B0423	Statistik	3	SIKAP:	Bahan Kajian:
	1021	dan		\$1,\$2,\$5	BK4
		Data		KETERAMPILAN UMUM:	Materi Pembelajaran:
				KU1,KU3,KU 5,KU9,KU12	Konsep dasar
		Science			2. Sistem Komputer
				KETERAMPILAN KHUSUS:	Sistem Telekomunikasi     Sistem Jaringan
				12177 12120 121244	4. Sistem Jaringan
				KK7, KK9, KK11	5. Pengantar SIM
				PENGETAHUAN:	<ol> <li>Pengantar Basis</li> <li>Aplikasi TI</li> </ol>
				FLINGLIAIIOAN.	7. Aplikasi 11
				PP 23	
				11 20	
52	B0415	Psikolo	3	SIKAP:	Bahan Kajian: BK9
				S3,S6	Materi Pembelajaran:
	135	gi		KETERAMPIL	Pengantar psikologi pemerintahan
		Pemeri		AN UMUM:	2. Teori kepemimpinan
		ntahan		KU3,KU5	3. Pengambilan keputusan
		manan		KETERAMPILAN KHUSUS:	4. Komunikasi politik
				KK3,KK4,,KK13,KK15	5. Perilaku organisasi
					6. Psikologi politik
				PENGETAHUAN:	7. Stres dan kesejahteraan pegawai
					pemerintahan
				PP10,PP11,PP12	8. Studi kasus dan analisis psikologis
			_		
53	B0424	Tata	3	SIKAP:	Bahan Kajian: BK5
	1002	Kelola		IZETED ARADU ANI LIRALIRA.	Materi Pembelajaran:
		Komuni		KETERAMPILAN UMUM:	1.1;1
				KETERAMPILAN KHUSUS:	2.l;
		kasi		KLI LKAWFILAN KI10303.	
		Pemeri		PENGETAHUAN	
		ntahan		LIGETATION	
		manan			
54	B0423	Manaje	2	SIKAP:	Bahan Kajian:
04			3	S2, S7, S9	Materi Pembelajaran:
	1022	men		KETERAMPILAN	Pengantar Manajemen Logistik dan
		Logistik		UMUM:	Pengadaan Barang Jasa
		dan		KU1, KU2, KU5,	2. Perencanaan logistik dan
				KU9	pengadaan
	1	Pengad		KETERAMPILAN	3. Pengadaan barang jasa publik
		1 5119515			J. Feligadaali balalig jasa bublik
		aan		KHUSUS:	0, 1
		aan			
		aan Barang		KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16	4. Regulasi pengadaan barang jasa
		aan		KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16 PENGETAHUAN:	<ul><li>4. Regulasi pengadaan barang jasa</li><li>5. Etika dan transparansi dalam</li></ul>
		aan Barang		KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16	<ul><li>4. Regulasi pengadaan barang jasa</li><li>5. Etika dan transparansi dalam pengadaan</li></ul>
		aan Barang Jasa		KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16 PENGETAHUAN: PP2, PP4, PP6, PP9, PP18	<ul> <li>4. Regulasi pengadaan barang jasa</li> <li>5. Etika dan transparansi dalam pengadaan</li> <li>6. Teknologi informasi dalam manajemen logistik</li> </ul>
55	B0423	aan Barang	3	KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16 PENGETAHUAN: PP2, PP4, PP6, PP9, PP18	<ul><li>4. Regulasi pengadaan barang jasa</li><li>5. Etika dan transparansi dalam pengadaan</li><li>6. Teknologi informasi dalam</li></ul>
55	B0423 1023	aan Barang Jasa	3	KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16 PENGETAHUAN: PP2, PP4, PP6, PP9, PP18 SIKAP: S2, S3, S5,	<ul> <li>4. Regulasi pengadaan barang jasa</li> <li>5. Etika dan transparansi dalam pengadaan</li> <li>6. Teknologi informasi dalam manajemen logistik</li> <li>Bahan Kajian:</li> </ul>
55		aan Barang Jasa Studi	3	KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16 PENGETAHUAN: PP2, PP4, PP6, PP9, PP18  SIKAP: S2, S3, S5, KETERAMPILAN	4. Regulasi pengadaan barang jasa 5. Etika dan transparansi dalam pengadaan 6. Teknologi informasi dalam manajemen logistik  Bahan Kajian:  Materi Pembelajaran:
55		aan Barang Jasa Studi	3	KHUSUS: KK1, KK2, KK8, KK16 PENGETAHUAN: PP2, PP4, PP6, PP9, PP18 SIKAP: S2, S3, S5,	<ul> <li>4. Regulasi pengadaan barang jasa</li> <li>5. Etika dan transparansi dalam pengadaan</li> <li>6. Teknologi informasi dalam manajemen logistik</li> <li>Bahan Kajian:</li> </ul>

				KETERAMPILAN KHUSUS: KK4, KK7, KK14, KK15 PENGETAHUAN: PP1, PP10, PP15, PP16, PP22, PP24	<ol> <li>Sejarah Gerakan gender</li> <li>Analisis kekuasaan dan kebijakan berspektif gender</li> <li>Partisipasi politik dan pemimpin perempuan</li> <li>Gender dan pembangunan</li> <li>Pengaruh gender dalam proses pengambilan keputusan</li> </ol>
56	B0423 1024	Kajian Kedarur atan Bencan a	3	SIKAP: S3 KETERAMPILAN UMUM: KU2,KU7,KU8,KU10  KETERAMPILAN KHUSUS: KK1,KK2,KK7,KK14,KK16 PENGETAHUAN: PP6,,PP19,PP20	<ul> <li>Materi Pembelajaran:</li> <li>1. Pengenalan bencana</li> <li>2. Peran pemerintah dalam kedaruratan bencana</li> <li>3. Sistem manajemen bencana</li> <li>4. Perencanaan kedaruratan bencana</li> <li>5. Respons darurat</li> <li>6. Komunikasi krisis</li> <li>7. Logistic dan pengadaan bantuan</li> <li>8. Pemulihan pasca bencana</li> <li>9. Kerjasama internasional dalam penanggulangan bencana</li> </ul>
57	B0415 129	Semina r Masala h pemerin tahan	3	SIKAP: S3, S6 KETERAMPILAN UMUM: KU10,,KU11,KU1 2 KETERAMPILAN KHUSUS: KK4,KK8,KK12,K K15,KK16 PENGETAHUAN : PP21,PP23	Bahan Kajian: BK5 Materi Pembelajaran: 1. Pengantar penelitian dalam ilmu pemerintahan 2. Perumusan masalah penelitian 3. Penyusunan kerangka konseptual 4. Desain penelitian 5. Etika penelitian 6. Presentasi hasil penelitian 7. Pengembangan keterampilan penelitian
	B0424 1003	Resolu si Konflik	3	SIKAP:  KETERAMPILAN UMUM:  KETERAMPILAN KHUSUS:  PENGETAHUAN	Bahan Kajian: BK5 Materi Pembelajaran: 1.I;I 2.I;

## 11. Pengelolaan Pembelajaran

Pengelolaan pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran di Program Studi Ilmu Pemerintahan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Permendikbud No. 20 Tahun 2020, yaitu memenuhi standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian pendidikan Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran; dan, standar pembiayaan Pembelajaran.

Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan meliputi penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah, menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Program studi ilmu pemerintahan FISIP Untad secara rutin dalam satu tahun sekali melakukan dialog akademik dan selama empat tahun sekali melakukan peninjauan kurikulum guna menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Setiap kegiatan akademik dilakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang di monitoring dan evaluasi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Universitas Tadulako dalam melaksanakan standar pengelolaan tersebut menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran; menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran; memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

## 12. Penutup

Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2024 ini merupakan rekonstruksi ulang atau revis dari kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2023. Rekonstruksi kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan didasarkan pada beberapa kebijakan diantaranya dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Keputusan Rektor Universitas Tadulako No. 1319/ UN.28/ KR/2024, Tentang Penetapan SKS Mata Kuliah Wajib Nasional, Umum, Dan Sains Dasar di Lingkungan Untad.

Penyelarasan terhadap kebijakan tersebut menungtut Kurikulum program Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan mesti mengalami perubahan sehingga mampu menyesuaiakan dengan kebutuhan kurikulum yang sesuai aturan dan berbasiskan kepada OBE (*out come base education*). Hal ini merupakan bagian dari penyelarasan terhadap Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, penyelarasan terhadap kurikulum yang disusun oleh Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Se- Indonesia berbasis *outcome based education* (OBE), serta adaptasi terhadap kebutuhan ilmu pengetahuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di era 4.0 dan 5.0.